

**PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS MARGA BANCIN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA KUTA TINGGI KECAMATAN SALAK KABUPATEN PAKPAK
BHARAT TAHUN 2022**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

TONI MANIK

1606016008

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksempler
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada.
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Toni Manik

NIM : 1606016008

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Penggunaan Politik Identitas Marga Bancin Dalam Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022

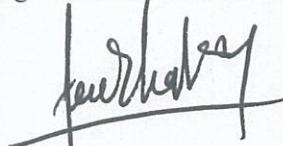
Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing.

Bidang Substansi Materi & Tatatulis



Muhammad Mahsun M.A.

NIP.198511182016011901

PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGUNAAN POLITIK IDENTITAS MARGA BANCIN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA KUTA TINGGI KECAMATAN SALAK KABUPATEN PAKPAK
BHARAT TAHUN 2022

Disusun oleh: Toni Manik

1606016008

Telah dipertahankan di majlis penguji skripsi

Pada tanggal 27 juni 2023 dan dinyatakan LULUS.

Susunan Dewan Penguji



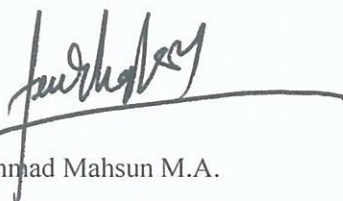
Penguji I
Dr. Adhwan Fanani, M.Ag.
NIP. 197809302003121001

Penguji II



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.
NIP. 198505022019031007

Pembimbing



Muhammad Mahsun M.A.
NIP.198511182016011901

PERNYATAAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Juni 2023



Toni Manik
1606016008

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penggunaan Politik identitas marga Bancin dalam pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022”**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengetahuan dan berintelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan morel maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Drs. Nur Syamsudin M.Ag dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.
4. Muhammad Mahsun M.A selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Ahwan Fanani M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama ini.

6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Pihak Pemerintahan Desa Kuta Tinggi yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
9. Perwakilan RT dan RW dalam Musrenbangdes yang telah rela meluangkan waktu untuk wawancara.
10. Teristimewa kedua orang tua saya Ibu Rumiah dan Bapak Uller Manik yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, do'a, kesabaran, semangat, nasihat, motivasi, pengorbanan baik dari segi morel, maupun material kepada penulis tiada henti dan tiada lelah sampai pada saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Juga maafkan anakmu ini, tidak bisa lulus tepat waktu.
11. Teman seperjuangan "Ilmu Politik 2016" Rizko, Alif, Ucup, dan semuanya terima kasih kalian yang selalu membuat penulis tertawa, termotivasi. Semoga pertemanan ini selalu terjalin sampai tua nanti. Amiiin
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2016, terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
13. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis haturkan terima kasih.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Sebagai rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, serta memberikan akal pikiran agar senantiasa menuntun ilmu. Spesial untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Uller Manik dan Ibu Rumiah yang telah menyemangatiku, membesarkanku, mendidikku, menuntun setiap langkahku, membebaskanku untuk melakukan hal-hal selama itu positif dan senantiasa selalu berdoa untuk kesuksesanku.

Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”

(QS, Al-Baqarah Ayat 286).

ABSTRAK

Politik identitas timbul karena adanya keinginan untuk diakui dan diperlakukan setara atau adil, kemauan untuk menjaga nilai budaya dari masing-masing kelompok, dan karena rasa kesetiaan kepada marga Bancinnya. Politik identitas dapat dimaknai sebagai suatu tindakan individu atau kelompok dalam politik yang mengutamakan perebutan kekuasaan dengan landasan kesamaan identitas, yang mana kesamaan tersebut termasuk pada marga, ras, gender, atau keagamaan (Buchari, 2014). Dalam Penelitian ini Membahas tentang penggunaan identitas marga Bancin yang digunakan dalam pemilihan kepala desa Kuta tinggi adanya identitas marga yang digunakan calon untuk memenangkan kontestan dalam pemilihan kepala desa Kuta Tinggi. Tahun 2022

Desa Kuta Tinggi merupakan desa yang notabilitasnya memiliki marga anantara lain marga bancin, berutu, Tumangger, Banurea dan marga lainnya. Desa Kuta tinggi dikenal dengan desa yang masyarakatnya memiliki adat istiadat yang masih kental dengan sisilah marga yang sifatnya masih turun temurun dari nenek moyang zaman dulu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan langsung yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan memahami pengalaman-pengalaman, Peneliti menggunakan data yang diperlukan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur, observasi partisipatif, serta melihat dokumen-dokumen terkait.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, Pertama; bahwa dalam pemilihan kepala di desa Kuta Tinggi marga bancin merupakan salah satu alat yang kuat dalam memenangkan kontestasi pilkades di desa kuta Tinggi, karena sejarahnya kepala desa kuta Tinggi dari Tahun ke tahun selalu di menangkan oleh marga bancin. Kedua dalam pemilihan kepala desa kuta Tinggi penggunaan politik identitas marga bancin selalu di digunakan para calon kepala desa untuk manipulasi dan mobilisasi masyarakat desa kuta tinggi, berdasarkan penelitian yang di lakukan di lapangan masyarakat desa kuta Tinggi cenderung memilih calon kepala desa berdasarkan marga yang sama yaitu marga bancin.

Kata Kunci: Politik Identitas, Marga, Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

Identity politics arises because of the desire to be recognized and treated equally or fairly, the desire to maintain the cultural values of each group, and because of a sense of loyalty to their Bancin clan. Identity politics can be interpreted as an individual or group action in politics that prioritizes the struggle for power on the basis of identity similarities, which similarities include clan, race, gender, or religion (Buchari, 2014). In this research, it discusses the use of the Bancin clan identity used in the election of the village head of Kuta Tinggi. There is a clan identity used by candidates to win contestants in the election of the village head of Kuta Tinggi. Year 2022

Kuta Tinggi Village is a village that in fact has clans including the bancin, beutu, Tumangger, Banurea and other clans. Kuta Tinggi Village is known as a village whose people have customs that are still thick with the clan side which is still hereditary from ancient ancestors.

This study uses a qualitative method with a direct approach used by researchers to analyze and understand experiences. Researchers use the necessary data by conducting unstructured interviews, participatory observation, and viewing related documents.

In this study it can be concluded several things, First; that in the election of the head of the village of Kuta Tinggi, the bancin clan is one of the powerful tools in winning the election contestation in the village of Kuta Tinggi, because historically the head of the village of Kuta Tinggi has always been won by the bancin clan from year to year. Secondly, in the election of the head of the village of Kuta Tinggi, the use of the bancin clan identity is always used by the candidate for the village head to manipulate and mobilize the people of Kuta Tinggi village, based on research conducted in the field, the people of the village of Kuta Tinggi tend to choose candidates for village heads based on the same clan, namely the clan effeminate.

Keywords: Identity Politics, Marga, Village Head Election

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Kajian Pustaka.....	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA TEORI	13
A. Politik Identitas	13
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KUTA TINGGI.....	21
A. Keadaan geografis	21
B. Marga Bancin	28
BAB IV <u>P</u> ENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS MARGA BANCIN DALAM PILKADES DI DESA KUTA TINGGI.....	34

A. Bentuk Politik Identitas yang Digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi	34
B. Strategi Pemilihan Kepala desa Kuta Tinggi	40
C. Proses Pemilihan Kepala Desa kuta Tinggi	44
D. Tahapan Pencalonan Marga Bancin.....	46
E. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Kampanye yang Dilakukan Calon Kepala Desa Kuta Tinggi.....	47
BAB V DAMPAK PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS MARGA BANCIN DALAM PILKADES DI DESA KUTA TINGGI TINDAKAN MANIPULASI DAN MOBILISASI.....	49
A. Dampak Positif.....	52
B. Dampak Negatif	52
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	58
DATA INFORMAN DALAM WAWANCARA	59
DATA HASIL WAWANCARA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik identitas timbul karena adanya keinginan untuk diakui dan diperlakukan setara atau adil, kemauan untuk menjaga nilai budaya dari masing-masing kelompok, dan karena rasa kesetiaan kepada marga Bancinnya. Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu marga Bancin untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu marga Bancin. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri marga Bancinnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik kemarga Bancinan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya (Abdillah, 2002).

Politik identitas dapat dimaknai sebagai suatu tindakan individu atau kelompok dalam politik yang mengutamakan perebutan kekuasaan dengan landasan kesamaan identitas, yang mana kesamaan tersebut termasuk pada marga, ras, gender, atau keagamaan (Buchari, 2014). Pada kontestasi politik elektoral demokrasi baik di tingkat nasional penggunaan politik identitas memiliki penggunaan politik elektoral sebagai basis mencapai kekuasaan. Politik identitas marga Bancin dalam istilah lain dipolitisasi untuk kepentingan politik, tujuannya adalah supaya setiap individu dalam menentukan pilihan didasarkan pada pengidentifikasian kesamaan marga Bancin, dalam kata lain program-program yang dikampanyekan oleh kontestan tidak menjadi bahan referensi utama pemilih. Pemandangan seperti ini dalam kontestasi demokrasi sudah menjadi hal yang lumrah.

Studi ini hendak mengkaji penggunaan politik identitas marga Bancin dalam pemilihan kepala Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022. Fenomena politik identitas yang terjadi di desa Kuta Tinggi, marga Bancin memiliki kekuasaan dan posisi tertinggi serta memiliki penggunaan besar dalam berdirinya daerah tersebut. Proses pemilihan kepala desa kuta Tinggi, faktor kesukuan dan marga merupakan suatu yang dominan ketimbang kapasitas dari sang kandidat. Jika dilihat dari permasalahan yang terjadi di desa Kuta Tinggi, jika salah satu calon kandidat kepala desa marga Bancin, Maka hal itu akan menjadi penguat untuk menjadi pemimpin di desa tersebut. Desa Kuta Tinggi menjadi obek

pembahasan dikarenakan intensitas identitas politik yang cukup kentara pada saat kontestasi pilkades pada tahun 2022 lalu. Sebagaimana diketahui, pada prinsipnya pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan demokratis. Pada kontestasi demokrasi pilkades di desa Kuta Tinggi, marga Bancin yang keterwakilannya menduduki jabatan sebagai kepala desa terbanyak sepanjang pesta demokrasi.

Jika melihat sejarah, marga Bancin merupakan marga yang memiliki populasi penduduk terbanyak dibandingkan dengan marga lainnya. Ikatan suku ataupun marga dalam pemilihan kepala desa Kuta Tinggi merupakan suatu ikatan yang mengandung daya paksa atau kekuatan yang didasarkan pada unsur-unsur asal atau primer yang selalu ada dalam masyarakat. Unsur-unsur yang dimaksud adalah faktor sejarah, rasa kesamaan dan hubungan kekerabatan seperti marga, Dalihan Na Tolu, dan pertalian darah yang dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilihan kepala desa Kuta Tinggi kecamatan salak Kabupaten Pakpak Bharat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses penggunaan politik identitas marga Bancin yang di digunakan para calon kepala desa dalam memenangkan pilkades di desa kuta tinggi kecamatan salak kabupaten pakpak barat.

Jika dilihat dari segi pemilihan kepala desa masyarakat di desa kuta Tinggi, faktor kesukuan dan marga merupakan suatu yang dominan ketimbang kapasitas, kredibilitas, dan integritas dari sang kandidat. Karena Masyarakat memiliki calon masing-masing yang dipercayai untuk bisa memimpin desa tersebut agar tercipta perubahan program-program yang lama dengan program yang baru agar masyarakat bisa makmur dan hidup sejahtera dan memajukan pembangunan desa. Calon kepala desa selalu menggunakan Marga untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat karena adanya keterkaitan dengan sejarah bahwasanya yang memimpin di daerah Tersebut haruslah orang yang memiliki marga Bancin. karena sejak awal dilaksanakannya pemilihan kepala desa yang memimpin desa tersebut adalah marga Bancin.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat menjadi salah satu desa yang memiliki banyak marga, yakni marga Bancin, marga Berutu, marga Banurea dan Padang. Desa Kuta Tinggi Desa memiliki jumlah penduduk sebesar 980 jiwa. Studi ini akan difokuskan pada dua kajian utama. Pertama, kajian teoritis yang berkenaan mengenai politik identitas yang terjadi di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat yang

memiliki pengaruh pada pemilihan kepala desa di beberapa tahun belakang, terkhusus pada pemilihan di tahun 2022. Kedua, kajian praktis yang melihat dan menelaah kondisi sosial masyarakat desa yang dipengaruhi oleh politik identitas tersebut, terkhusus kepada penggunaan marga Bancin yang digunakan untuk pemantik suara pada Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022. Melalui dua fokus kajian tersebut, diharapkan penelitian ini akan menjawab permasalahan yang terjadi mengenai politik identitas yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjelasan dan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan, atau dengan kata lain, perumusan masalah merupakan pernyataan lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah. Berdasarkan penjelasan di atas dan berangkat dari latar belakang masalah, peneliti mencoba merumuskan permasalahan;

1. Bagaimana Politik Identitas Marga Bancin digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.
2. Bagaimana dampak politik identitas marga Bancin dalam pemilihan kepala Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji dalam sebuah penelitian Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang berhubungan dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penggunaan Politik Identitas Marga Bancin Dalam Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.
2. Untuk Mengetahui dampak Politik marga bancin dalam Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian tentang pengaruh politik identitas marga dalam pemilihan kepala desa Kuta Tinggi diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dan pandangan politik

bagi civitas ilmu politik dalam taraf akademik maupun non-akademik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas teori-teori yang memiliki hubungan dengan konsep perpolitikan yang terjadi dalam hal pengaruh identitas marga di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a) Dalam kajian ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan literasi masyarakat dalam menentukan pilihan dan konsep politik yang ada disekitarnya, serta dapat memacu *critical thinking* masyarakat dalam memantau dan mengawasi jalannya pemilihan di Indonesia dalam lingkup terkecil di pemilihan kepala desa.
- b) Dalam membangun analitis penulis, penelitian ini merupakan langkah kepedulian penulis terhadap kegiatan politik yang terjadi di daerah asal penulis, serta menjadi sebuah kritik ilmiah dalam tulisan skripsi ini, bahwa politik identitas marga di desa Kuta Tinggi, saat ini masih tetap memiliki posisi yang paling tinggi dalam pemilihan kepala desa Kuta Tinggi.
- c) Bagi Masyarakat Desa Kuta Tinggi
Bermanfaat sebagai sarana pengetahuan literasi politik, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya tidak hanya dari satu marga Bancin marga saja, namun dapat memilih dengan meninjau kejujuran, kualitas dan kompetensi yang dimiliki calon kepala desa yang akan mendatang.

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tentang politik identitas yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan kepala desa dan jalannya demokrasi pada suatu tempat. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap kajian pustaka terdahulu ditemukan bahwa penelitian tentang politik identitas telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian Fitri Hapsari Zainuddin tahun 2017, “Pilkada dan Politik Identitas Multikulturalisme di Lawu Timur (studi terhadap kemenangan Thoriq Husler dalam Pilkada Serentak 2015).” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada di Luwu Timur Tahun 2015, marga Bancin tidak memainkan penggunaan penting karena sentimen pemilih berdasarkan isu etnik relatif kecil. Terdapat beberapa

persamaan dengan penulis seperti metode penelitian kualitatif serta teori yang digunakan untuk menelisik strategi kemenangan pemilu. Akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan seperti tempat dan waktu penelitian. Penelitian Hafsari mengangkat secara khusus tentang pilkada dan politik multikulturalisme. Sedangkan penulis mengenai politik identitas dalam kemenangan pilkada Kota Mataram tahun 2015.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Irfan Zharfandy tahun 2016 mengenai “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilkada Gubernur Sulawesi Selatan diwarnai oleh penggunaan hierarkis (patron-klien) dimana faktor kekerabatan sebagai basis alasan pemilih dalam menentukan pilihannya. Terdapat beberapa kesamaan penelitian ini dengan penulis seperti metode penelitian kualitatif, salah satu teori yang digunakan, dan kesamaan sudut pandang mengenai adanya pengaruh politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu. Namun terdapat juga beberapa perbedaan seperti lokasi dan waktu penelitian, serta arena kontestasi yaitu pilkada Gubernur dan pilkada Wali Kota.

ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fikri Adrian tahun 2013 mengenai “identitas etnik dalam pemilihan kepala daerah (studi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian, dalam pemilihan Gubernur di DKI Jakarta isu SARA memiliki pengaruh besar terhadap perilaku politik masyarakat, sehingga masyarakat yang masih kental dengan atribut entitas tertentu sangat mudah untuk dipengaruhi. Terdapat beberapa persamaan dengan penulis seperti metode penelitian, teori yang digunakan. Terdapat beberapa perbedaan seperti tempat dan waktu penelitian serta arena kontestasi pilkada gubernur sedangkan penulis mengenai politik identitas agama dan marga Bancein sebagai alat kontestasi politik dalam pilkada wali kota Tahun 2015.

Keempat, penelitian Melinda Adi Pratiwi tahun 2017 berjudul “Politik Identitas Dalam Perspektif Politisi Tionghoa Surabaya (Studi Kasus di DPRD Kota Surabaya). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa dalam lembaga pemerintahan di DPRD Kota Surabaya politik identitas dianggap sebagai hal yang lumrah dan masih dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Terdapat kesamaan dengan penulis seperti metode penelitian yang digunakan, teori politik identitas yang digunakan dalam penelitian.

Terdapat beberapa perbedaan seperti tempat dan waktu penelitian dan penelitian ini lebih membahas adanya politik identitas dalam suatu lembaga pemerintahan sedangkan penulis mengenai adanya politik identitas dalam pilkada.

Kelima, penelitian Sonny tahun 2019 mengenai “Peta Politik Identitas Di Indonesia (Studi Terpilihnya KH. Makruf Amin Sebagai Cawapres Incumbent Joko 13 Widodo pada Pilpres 2019)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa dalam tahap pelaksanaan demokrasi di Indonesia politik identitas terus berkembang sampai saat ini menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terdapat beberapa persamaan seperti metode penelitian yang digunakan, adanya pelaksanaan politik identitas dalam pelaksanaan demokrasi dan isu-isu identitas yang dibangun dalam mempengaruhi pemilih pada pemilu. Namun juga terdapat beberapa perbedaan seperti tempat dan waktu penelitian serta penelitian ini membahas mengenai kontestasi identitas dalam Pemilu Presiden sedangkan penulis mengenai kontestasi identitas dalam pilkada.

Keenam Pada penelitian Sihombing & Kusmanto, (2017). “Politik Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2010-2015”, Membahas tentang bagaimana perkembangan perpolitikan di daerah Pakpak Bharat pada satu periode pemerintahan di tahun 2010-2015, serta apa saja yang menjadi suatu gebrakan dan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam satu periode pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan pembangunan politik dengan bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menghasilkan tentang bagaimana orientasi yang dihasilkan melalui kebijakan yang disusun dalam pembangunan Pakpak Bharat dengan tinjauan kondisi SDA dan SDM di kabupaten tersebut. Penelitian berkesimpulan, bahwa segala penyelenggaraan yang tertuju kepada masyarakat hendaknya memiliki ruang dialog terlebih dahulu kepada masyarakat, mengingat masyarakat merupakan komponen utama dalam berjalannya politik dan pembangunan di Indonesia (Sihombing & Kusmanto, 2017).

Ketujuh Melalui penelitian Alfaqi (2015), “Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas”. Penelitian ini membahas tentang kehadiran politik identitas dalam konsep nasionalisme di bangsa Indonesia. Hadirnya politik identitas dalam perjalanan bangsa juga dinilai sebagian peneliti sebagai konsep solidaritas. Penelitian ini juga memberikan pemaparan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan dari konsep nasionalisme, politik identitas dan solidaritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode kepustakaan. Penelitian yang menyimpulkan tentang konsep nasionalisme sangat penting bagi arah pergerakan dan perubahan bangsa, namun dalam membangun konsep nasionalisme tidak akan pernah lepas dari hadirnya konsep politik identitas yang memiliki tempat tersendiri dalam corak adat bangsa. Kedua warna politik tersebut akan disempurnakan dengan rasa solidaritas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia (Alfaqi, 2015).

Kedelapan penelitian Haluana'a, dkk (2020) "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Penelitian yang mengambil permasalahan bagaimana partisipasi masyarakat Desa Orahili tentang adanya pemilihan kepala desa di daerah Orahili. Penelitian yang menganalisis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala desa Orahili kecamatan Pulau-Pulau, kabupaten Nias Selatan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan mengambil data secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi tentang pemilihan kepala desa Orahili. Penelitian berkesimpulan besarnya partisipasi masyarakat dikarenakan adanya mobilisasi politik di Indonesia dari elite politik, tetua desa, tokoh masyarakat dan isu program yang dihadirkan para calon pemilihan kepala desa di Indonesia (Haluana , 2020).

F. Kerangka Teori

1. Definisi konseptual

a) Politik Identitas

Politik identitas secara teoritis dapat dikatakan sebagai sifat yang mendarah daging dalam diri setiap manusia, marga Bancin, suku, bahkan agama yang memiliki ciri khas dengan sifatnya yang laten dan potensial dalam keadaan yang memiliki kekuatan untuk mengambil alih isu kekuasaan atau kemenangan (Ainur, 2020). Kemudian, pengertian politik identitas secara empiris merupakan aktualisasi akan hadirnya partisipasi kebudayaan masyarakat yang struktur dan konseptual sehingga menghasilkan internalisasi jaringan sosial secara politik. Politik identitas dibedakan antara identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political of identity) (Haboddin, Muhtar, 2012). Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik

sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Politik identitas diasaskan pada esensialisme strategis, dimana kita bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal tertentu.

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Jadi secara umum teori politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat marga Bancin dan agama menjadi menarik dan muncul (*salient*) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika marga Bancin dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilu, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti marga Bancin dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan.

Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (*grand narrative*), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*free play*), meskipun kemudian ancaman baru muncul. 21 Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (*race thinking*), biofem animisme dan perselisihan marga Bancin menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai bentuk baru intoleransi, praktek praktek kekerasan pun muncul. Heller (1995:).

Selanjutnya Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya lebih kepada perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Lebih lanjut, Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa: Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Dengan demikian, politik identitas sekedar untuk dijadikan untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.

b) Marga Bancin

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten yang berasal dari Sumatera Utara melalui pemekaran dari kabupaten Dairi, sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 2003 tentang kabupaten Humbang Hasuhundutan, kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Nias Selatan. Masyarakat Batak memiliki sistem tali persaudaraan yang kuat dalam falsafah kehidupan mereka (Sihombing & Kusmanto, 2017). Marga yang biasanya digunakan untuk mencerminkan identitas seseorang di Indonesia, juga memiliki kegunaan yang lebih fungsional, yakni dalam perpolitikan masyarakat di Sumatera Utara. Marga sebagai basis politik memiliki kekuatan dan tempat khusus di masyarakat Sumatera Utara. Pada dialektika politik, marga digunakan sebagai senjata yang lumayan ampuh untuk memenangkan pemilihan pemimpin di daerah Sumatera Utara. Sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang kental melalui adat dan tradisi yang sudah dilakukan oleh leluhur atau pendahulu sebelumnya. Kelanjutan dari perpolitikan marga adalah dengan membentuk tim sukses yang terdiri dari golongan masyarakat yang memiliki marga yang sama dan memiliki keterikatan saudara dengan marga yang ikut dalam kompetisi pemilihan (Haloho, 2020).

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu agar sampai pada suatu tujuan tertentu (Darmalaksana, 2020). Sedangkan pengertian penelitian merupakan suatu proses yang diperbuat berdasarkan sistematika kerja ilmiah yang memiliki frekuensi secara teratur, berurut, sistematis dan logis sebagai usaha untuk menelaah, mengkaji, dan menemukan solusi dari suatu masalah. Melalui hal tersebut,

metode penelitian merupakan tata cara yang dikerjakan melalui langkah kerja ilmiah yang ditujukan untuk menemukan jawaban pada tujuan tertentu, dalam kaitan ini yaitu menemukan solusi ilmiah dari suatu masalah.

Berikut ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini konsep kinerja penelitian kualitatif melalui pendekatan (*library research*) yaitu memfungsikan sumber data perpustakaan untuk memperoleh data penelitian tanpa melalui riset lapangan (Saleh, 2017). Penelitian kualitatif pustaka dapat dikatakan sebagai tinjauan relevan dalam penerapan dan penulisan penelitian ini karena pada dasarnya penelitian ini membahas tentang perpolitikan marga yang ada di daerah Sumatera Utara.

Melalui jenis penelitian kualitatif pustaka ini peneliti akan memberikan penalaran keilmuan dari hasil kajian pustaka dipadukan dengan hasil olah pikir peneliti mengenai politik marga dalam pemilihan kepala Desa Kuta Tinggi tahun 2022. Data-data perpustakaan yang nantinya digunakan meliputi beberapa hal, di antaranya: jurnal, laporan penelitian, buku, dan lain sebagainya. Semua data perpustakaan yang berhubungan dengan tema perpolitikan dan sistem politik marga akan diklasifikasikan dan dianalisis sedemikian rupa sehingga ditemukan hasil akhir penelitian yang relevan.

2. Sumber data

Melalui telaah sumber, data yang digunakan pada penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian sumber data, yaitu data primer (data inti) dan data sekunder (data pendukung). Data primer merupakan rujukan yang dijadikan sebagai pustaka utama dalam suatu penelitian, yang dalam hal ini dirujuk langsung oleh seseorang yang memiliki sebuah perihal tujuan untuk menggunakan data tersebut (Rijali, 2018). Data utama yang digunakan sebagai rujukan inti melalui penelitian ini adalah hasil pemilu dan rentetan dokumen ilmiah yang memiliki tema yang relevan tentang perpolitikan di Indonesia.

Adapun data sekunder (data pendukung) merupakan rujukan yang secara pembahasan maupun tujuan penelitiannya tidak secara langsung berkaitan atas keterhubungan dengan konsep pokok permasalahan yang diungkapkan, dan tidak secara langsung pula dikumpulkan oleh orang yang memiliki kepentingan dengan

data tersebut. Data sekunder yang akan digunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian adalah data-data tambahan yang relevan dengan tema bahasan utama yakni politik marga dalam pemilihan kepala Kuta Tinggi tahun 2021.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang memiliki standar sistematis dan validitas dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian (Mudjia, 2017). Berhubungan dengan teknik pengumpulan data yang diberlakukan, penelitian ini memberlakukan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi analitis, yakni dengan perlakuan data-data dengan telaah, pencatatan dan verifikasi ketersediaan data (Darmalaksana, 2020). Studi dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh sumber-sumber tertulis yang dibutuhkan terkait dengan politik marga dalam pemilihan kepala Desa Kuta Tinggi tahun 2021.

4. Teknik analisis data

Reduksi seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara komprehensif dengan verifikasi yang sistematis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi), suatu analisis dengan cara mengkaji data yang sedang diteliti (Samsu, 2017). Sedangkan dalam proses analisis data peneliti akan menggunakan tiga bagan kegiatan, meliputi: reduksi (pengumpulan) data, penelaahan data, dan verifikasi (telaah kebenaran) (Raco, 2010).

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi diperlukan adanya sebuah rancangan sistematika penulisan guna memberikan alur yang struktur dalam penelitian. Sistematika penulisan terbagi melalui tiga bagian, antara lain yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Melalui hal tersebut, penulisan sistematika penulisan ini terdiri diantaranya:

Pada bagian awal skripsi memuat halaman judul, nota pembimbing, lembar pengesahan, lembar pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, halaman abstrak, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran

Bahasan bagian BAB I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bahasan bagian BAB II terdiri mengenai teori Politik Identitas, Marga.

Bahasan BAB III terdiri mengenai profil Desa Kuta Tinggi, sub bab terdiri dari gambaran umum Desa kuta Tinggi, pilkades di Desa Kuta Tinggi Tahun 2022, marga Bancin.

Bahasan BAB IV terdiri tentang Penggunaan politik identitas marga Bancin dalam pemilihan Kepala desa

Bahasan BAB V terdiri tentang penggunaan politik identitas marga Bancin dalam mobilisasi pemilihan kepala desa

Bahasan BAB VI terdiri mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Politik Identitas

Pada awal sejarahnya, istilah politik identitas muncul pada sekitar tahun 1970. Kemunculan istilah tersebut, karena adanya beragam gerakan sosial politik yang berlangsung dalam skala besar yang dilakukan oleh orang-orang Amerika-Afrika sejak tahun 1950. Ditandai dengan adanya berbagai gejolak perbudakan dan diskriminasi rasial yang terjadi pada saat itu, karena adanya kebijakan dari negara yang cenderung melemahkan hak-hak sipil masyarakat, terutama kelompok minoritas di Amerika yang mengakibatkan hilangnya kebebasan serta kesetaraan terhadap warga negara. Akhirnya memunculkan banyak gerakan sipil dari berbagai kelompok yang menuntut kebebasan dan kesetaraan (Laode Machdani Afala, 2018).

Pemahaman politik identitas mengacu pada seorang penganut paham poststrukturalisme-postmodernisme. Penggunaan Michel Foucault yang mengkritik konsekuensi-konsekuensi negatif modernisme dan menunjukkan keberpihakannya pada “wacana-wacana yang tertindas dari wacana besar yang mendominasi dan mengontrol, yang kemudian disebut politik identitas (biopolitik) seperti perbedaan-perbedaan tentang politik tubuh. Agnes Heller mengasumsikan politik identitas merupakan politik yang memfokuskan perbedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan marga Bincin. Politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalisme (politik isu lingkungan), dan perselisihan Etnis.

Agnes Heller politik identitas (Rozi dkk, 2019:1) politik identitas secara sederhana dapat dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada perbedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Menurutnya, politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun dilain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik, dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan. Indikator menurut Agnes Heller (Rozi dkk, 2019:1) indikator politik identitas ada empat yaitu: 1). Penyebab, 2). Peran atau pengaruh, 3). Strategi, 4). Dampak.

Jadi secara umum teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (*salient*) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk Pilkada, adalah proses politik dimana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan.

Untuk memperjelas batasan kajian tentang politik identitas diperlukan pengelaborasi teori dari sejumlah pakar. Mengingat politik identitas merupakan fokus perhatian yang relatif baru dalam perkembangan politik di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan simbol-simbol tertentu dalam pemilu dan Pilkada di Indonesia. Upaya-upaya elite politik untuk mengetengahkan isu-isu primordialisme mencakup identitas etnik dan agama sebagai alat memobilisasi dukungan politik marak terjadi. Sebagai instrumen elite politik dalam pemenangan kontestasi politik, pemanfaatan politik identitas justru kerap menimbulkan pembelahan tajam di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih masyarakat menentukan pilihannya dalam pemilu berbasis visi-misi kandidat, politik identitas terus diproduksi di ruang publik oleh elit agar memperoleh dukungan elektoral.

Dalam kondisi alamiah, ikatan kolektivitas berbasis perbedaan etnik dan agama memang sesuatu yang bersifat esensial dan *given*. Tentu saja segala upaya untuk menyeragamkannya adalah bukan hanya tidak perlu, namun juga sia-sia. Proses internalisasi yang berlebihan disebabkan karena perbedaan cara pandang politik menyebabkan terjadinya potensi ketegangan serta konflik di tengah masyarakat.

Politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*) (Haboddin, Muhtar, 2012). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Politik identitas diasaskan pada esensialisme

strategis, dimana kita bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal tertentu.

Jadi secara umum teori politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua factor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (salient) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitassaling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilu, termasuk Pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isuisu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan.

1. Pengertian politik identitas

Politik identitas adalah mengacu pada kecenderungan orang-orang dari latar belakang tertentu untuk membentuk aliansi politik, sementara menjauh dari politik partai koalisi tradisional. Hal ini dianggap telah memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan hak-hak sipil bagi banyak kelompok minoritas, tetapi beberapa mengatakan bahwa membentuk asosiasi semacam ini berisiko mengacaukan pandangan orang terhadap kelompok lain, sementara yang lain berpendapat istilah itu sendiri bermasalah. Dan politik identitas bisa dimaknai sebagai strategi dan kontestasi ikatan simbol kultural primordial (agama, suku, ras, kelompok) dalam memperjuangkan siapa mendapat kekuasaan.

Menurut Mubarak (Pora, 2018), Politik identitas menjadi suatu masalah bagi negara yang beragam seperti Indonesia karena beberapa hal berikut. Pertama, politik identitas sangat berpotensi untuk mengecilkan bahkan menghilangkan identitas lain yang hidup di tengah masyarakat. Kedua, politik identitas kurang memberikan ruang pada perdebatan yang berkualitas soal program kerja, melainkan masyarakat diharuskan untuk memilih atas dasar kesamaan identitas. Ketiga, politik identitas lebih sering memecah belah masyarakat ketimbang menyatukan.

Politik Identitas menurut Lukmantoro (2018) adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berkaitan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar primordial. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendapatkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah Kota identik dengan agama tertentu.

2. Faktor-faktor politik identitas

Faktor-faktor timbulnya politik identitas adalah sebagai berikut.

Faktor utama mengapa kandidat menggunakan isu identitas dalam menarik simpati karena adanya faktor sosiologis dari perilaku pemilih yang cenderung memilih kandidat berdasarkan dari etnis yang sama. Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa politisasi identitas dilakukan karena adanya pencarian massa yang dilakukan oleh elite-elite politik. Mereka kerap melakukan pemetaan pemilih berdasarkan perilaku politik pemilih. Hal ini dijelaskan dalam teori milik Daniel N. Posner (2007:1). Teori ini menjelaskan ada dua kecenderungan elit politik menggunakan isu-isu identitas sebagai berikut:

- a) Kandidat-kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap etnisitas menjelang arena pemilihan. Target yang menjadi sasaran adalah etnis yang bersangkutan maupun yang berdekatan dengan etnis tersebut.
- b) Kandidat memainkan kartu etnis (playing ethnic card) untuk mengamankan batas keunggulan yang dimilikinya dalam sebuah arena kompetisi baik ketika pemilihan berlangsung maupun setelah pemilihan. Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas.

Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang. Ada tiga pendekatan pembentukan identitas, yaitu:

- a) Primordialisme Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun.
- b) Konstruktivisme Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan ikatan kultural dalam masyarakat.
- c) Instrumentalisme Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009).

3. Ciri-ciri politik identitas

Ciri-ciri yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, terutama ciri-cirinya yang terkait dengan ciri-ciri sosiologis atau antropologis, misalnya ciri-ciri yang tercermin pada adat istiadat yang dilakoninya, agama yang dianutnya, Bahasa yang digunakan, dan asal usul nenek moyangnya. Kelompok etnik ini dapat diidentifikasi dalam lingkungan budaya yang lebih luas melalui berbagai cara, seperti dari riwayat kehadirannya di tengah lingkungan budaya yang lebih luas, dari praktek keagamaan yang dilakukannya, diskriminasi yang diperolehnya dan dari kelompok masyarakat yang lebih besar. Selain itu, anggota kelompok etnik memiliki ciri fisik yang khas (Ramsey, 2003). Kata etnis sering dikacaukan dengan kata ras meskipun sudah jelas bahwa kata ras mengacu pada ciri-ciri biologis dan genetik yang membedakan seseorang dari orang lain dalam suatu kelompok masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan ciri-ciri ini, ditemukan pada umumnya semua manusia dikelompokkan menjadi tiga jenis ras, yaitu ras Caucasoid, Negroid, dan Mongoloid.

Kekacauan ini terjadi karena, perbedaan yang sering terjadi pada kelompok-kelompok dalam suatu ras yang menyebabkan kelompok ini dipandang sebagai kelompok yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dan diperlakukan secara berbeda oleh anggota kelompok yang lebih besar dalam kelompok ras tersebut (Ramsey, 200:23). Artinya, dalam suatu ras tertentu, bisa jadi terdapat beberapa kelompok yang lebih kecil yang dipandang sebagai etnis tersendiri. Oleh karena itu, etnis

tidak lagi selalu dilihat dari sudut ras yang dimiliki suatu kelompok etnis. Kelompok etnis memiliki kesamaan asal usul dan nenek moyang, memiliki pengalaman atau pengetahuan masa lalu yang sama, mempunyai identitas kelompok yang sama, dan kesamaan tersebut tercermin dalam lima faktor, yaitu kekerabatan, agama, bahasa, lokasi pemukiman kelompok, dan tampilan fisik.

4. Dampak politik identitas

Dampak dari politik identitas, di beberapa daerah bisa dijadikan suatu referensi bahwa selain menguatkan integritas dalam suatu kelompok pada waktu yang sama juga terjadinya suatu kondisi disintegrasi dalam masyarakat. Politisasi Sara seringkali menjadi pemicu hadirnya konflik dalam masyarakat. Berangkat dari suatu peran politik identitas di Kota Jambi dalam kontestasi pilkada maka tentu memiliki dampak baik di dalam etnis maupun antar etnis. Politik identitas memiliki pengaruh yang sangat besar terkhusus pada masyarakat yang multi etnis. Identitas sudah dimaknai sebagai instrumen dalam agenda politik. Berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara refleksif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21). Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis. Dalam pengamatan peneliti yang berkaitan dengan dampak dari peran politik identitas tersebut satu bukti adalah dominasi posisi di dalam birokrasi pemerintahan desa.

Jika melihat catatan sejarah, khususnya dalam pemerintahan pusat pada era kepemimpinan Soeharto memperoleh suatu referensi bahwa seperti apa buruknya suatu sistem sehingga hadir berbagai masalah seperti ketidakadilan, korupsi dan sebagainya. Sementara itu, baik etnis Tere, Jombok dan Pa^{ang} kurang lebih keadaannya sama dengan etnis Ndahe terkait integritas dalam kelompok. Kolektivitas yang terbangun merupakan suatu sikap komitmen dan tujuan yang sama sehingga menguatnya integritas. Akan tetapi jika bergeser pada dampak negatifnya adalah tumbuh perpecahan karena masing-masing etnis menanamkan sikap ego atau etnosentrisme sehingga mengabaikan persatuan di tengah-tengah perbedaan yang disebabkan oleh konstruktivisme identitas politik etnik. (Widayanti 2009: 18) secara filosofis identitas merupakan konsep yang mempunyai dua pengertian di dalamnya yaitu singleness over time dan sameness

and difference. Berarti terdapat dua konsep mengenai identitas yaitu persamaan. lain (the other). Individu mengidentifikasi diri mereka dan orang lain. Ketika individu membentuk siapa dirinya maka secara otomatis ia akan mencari negasinya atau the other. Berkaitan dengan dampak dari peran politik identitas etnis tersebut, berikut:

a) Dampak Positif

Membuka ruang komunikasi di dalam masing-masing etnis sehingga memungkinkan tumbuhnya solidaritas kelompok.

b) Dampak Negatif

Pada sisi lain tidak bisa lihat bagaimana pembelahan terjadi yaitu antar etnis memiliki egoisme dan berimplikasi terjadinya konflik.

B. Kerangka Teori

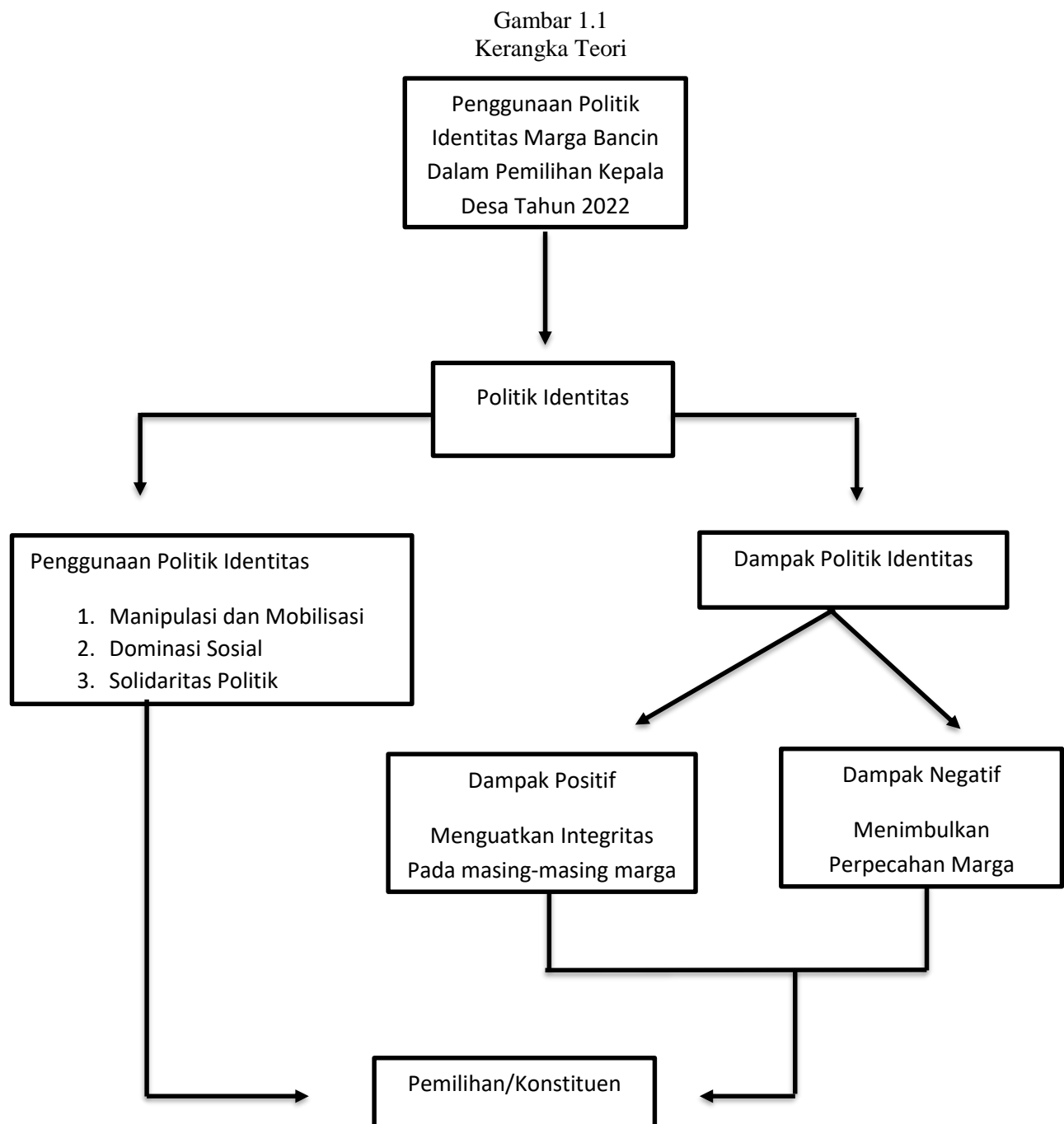
Kerangka berpikir adalah alur yang menjelaskan secara garis besar bagaimana proses suatu penelitian itu berjalan. Dalam Skripsi ini kerangka berfikir menjelaskan adanya masalah awal dari penelitian ini yaitu, tentang pelaksanaan Kemenangan Politik Identitas Dalam Penggunaan politik identitas dalam pemilihan kepala desa kuta Tinggi. Di dalam menganalisis peran politik identitas etnis tersebut, penulis akan mengidentifikasinya melalui pendekatan teori instrumental, dominasi sosial dan solidaritas politik. Teori instrumental dalam konteks politik merupakan suatu identitas yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dalam memobilisasi masa pada aspek politik yang kegiatannya mencakup manipulasi dan mobilisasi.

Orang dengan dominasi sosial yang tinggi adalah orang yang percaya bahwa kehidupan terbagi ke dalam struktur yaitu yang di atas dan yang di bawah. Mereka yang di atas adalah mereka yang menang, memiliki kekuasaan, atau memiliki seluruh nilai-nilai yang positif. Terbentuknya konstruksi sosial yang membuat suatu kelompok atau individu menonjol dikarenakan suatu karakteristik tertentu, contohnya ras, suku, kelas sosial, agama, dan lain sebagainya.

Sedangkan solidaritas politik merupakan gejala postmodern politik. Gejala ini ditandai dengan akomodasinya kekuatan sosial dalam politik. Melihat politik sebagai alat dan tujuan sekaligus. Karena sebagai alat dan tujuan sekaligus maka politik memang harus menyertakan banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek itu harus disertakan agar elit politik bisa mendapatkan kekuasaan dalam alam liberalisasi politik. Dalam penerapan politik identitas etnis sebagai basis memperoleh kekuasaan,

terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya menguatkan ikatan atau integritas dalam masing-masing kelompok etnis. Sedangkan dampak negatifnya adalah akan timbul suatu perpecahan antara kelompok masyarakat. Elit politik dalam menggunakan identitas etnis untuk memobilisasi masa, akan tumbuh sekte-sekte dalam masyarakat berdasarkan pengelompokan etnis masing-masing. Fenomena tersebut cenderung menguatkan sisi etnosentrisme antar etnis sehingga berpotensi menimbulkan konflik.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dapat digambarkan kerangka berpikiran sebagai berikut:



BAB III

GAMBARAN UMUM DESA KUTA TINGGI

A. Keadaan geografis

Desa Kuta Tinggi adalah salah satu wilayah yang berada di Kecamatan salak Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan pakpak bharat seluas 109,19 km² dan berada pada ketinggian 700 s/d 1400 m dari permukaan laut serta memiliki suhu yang lembab. Sebelumnya Kabupaten Pakpak Bharat merupakan bagian dari Kabupaten Dairi termasuk Desa kuta Tinggi dan desa lainnya yang masih dalam naungan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sekarang. Namun berdasarkan UU No. 9 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten baru seperti Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat, maka pada tanggal 28 juli 2003, Kabupaten Pakpak Bharat resmi memisahkan diri dari Kabupaten Dairi. Sejak pemekaran tahun 2003 Kabupaten Pakpak Bharat mendirikan wilayah sendiri dan membentuk beberapa kecamatan baru salah satu diantaranya adalah Kecamatan salak salah satunya adalah Desa Kuta Tinggi.

Secara administrasi Kecamatan salak terdiri dari 4 desa, yaitu salak 1, Desa kuta Tinggi, Desa binaga boang, Desa sibongkaras.

Gambar 1.2
Peta Desa Kuta Tinggi



www.pakpakbharatkab.bps.go.id

Adapun lembaga kemasyarakatan Desa Kuta Tinggi sebagai berikut

1. Lembaga kemasyarakatan

Table 1.1
Lembaga Kemasyarakatan

no	Nama Lembaga	jumlah	anggota
1	lpm	1	10
2	Karang taruna	1	23
3	pkk	1	45
4	rt	-	
5	rw	-	

a) Kondisi Demografis

Secara geografis Desa Kuta Tinggi terletak pada 2.593 garis Lintang Utara dan 98,322 Bujur Timur. Wilayah Desa Kuta Tinggi memiliki lahan yang cenderung bahkan keseluruhan arealnya adalah dataran. Desa Kuta Tinggi terletak di jalur lintas antara Jalan Protokol dan Desa penanggalan Binanga boang. Desa kuta Tinggi memiliki luas 337 Ha dan berada pada ketinggian 700 s/d 1400 m dari permukaan laut serta memiliki suhu udaranya mencapai 30 – 35 C. Masyarakat di Desa Kuta Tinggi adalah masyarakat yang heterogen, terdapat berbagai marga-marga yang menjadi ciri khas dari suku Pakpak dan juga bermacam-macam agama yang dianut oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk Desa Kuta Tinggi sekitar 974 jiwa dengan rincian 533 jiwa laki laki dan 706 jiwa perempuan yang demikian ini tergabung dalam 324 Kartu Keluarga. Terdapat tiga dusun yang menjadi bagian dari Desa kuta Tinggi serta mempunyai penduduk yang beragama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Kharismatik yang telah tersebar dan terbagi diketiga dusun. Diantaranya Dusun I, dari Kantor Desa sampai simpang Gereja; Dusun II, dari Simpang Sekolah sampai Kantor balai desa; Dusun III, dari Jalan Protokol sampai Sekolah Menengah Theologi Kristen (SMTK).

Adapun batasan wilayah Desa Kuta Tinggi adalah sebagai berikut:

- (a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa sibongkaras.
- (b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Singgabur.
- (c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa mungkur.
- (d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa penanggalan binaga Boang.

b) Mata Pencaharian

Dilihat dari kondisi daerahnya Desa Kuta Tinggi mengikut kondisi wilayah induknya yakni beriklim tropis. Serta lahannya yang cenderung dataran maka mata pencaharian masyarakat Desa Kuta Tinggi pada umumnya kebanyakan di pengaruhi oleh keadaan tanah di daerah Kabupaten Pakpak Bharat sendiri. Sebagian besarnya merupakan daerah dataran maka yang lebih mendominasi adalah persawahan sampai ke pegunungan dan sedikit berbukit bukit. Dengan didukung oleh suhu udaranya mencapai 30 – 35 C sehingga di daerah ini kebanyakan mata pencahariannya adalah bertani, seperti padi, kopi, cabai dan jagung.

Hasil sektor pertaniannya juga cukup luas dan jumlahnya besar, namun untuk meningkatkan mutu perekonomian masyarakat kebanyakan hasil produksi pertaniannya dijual keluar wilayah, karena kurangnya keahlian masyarakat dalam mengolah bahan mentahannya. Selain pertanian sebahagian penduduknya ada juga berprofesi sebagai Peadagang, Wiraswasta, tenaga pengajar (Honorar) dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.2
Jenis Pekerjaan Dan Jumlahnya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	34
2	Petani	298
3	Tukang	62
4	Pedagang	23

(Sumber: Pemerintahan Kantor Kepala Desa Kuta Tinggi Tahun 2023)

c) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Dimana pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan

sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian yang bertujuan untuk mencerdaskan juga mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik.

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kuta Tinggi

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah	23
2	SD	45
3	Tamat SMP	76
4	Tamat SMA	134
5	Tamat D3	12
6	S1	28
7	S2	-

d) Kondisi Keagamaan dan adat Istiadat

(b) Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Kuta Tinggi menganut agama Islam dan Kristen, yang mana agama Kristen ada 2 bagian yakni ada Kristen Protestan Kristen Katholik. Gerakan Kharismatik sering disebut dengan nama pembaruan kharismatik dan dikenal dengan gerakan gerakan pentakosta baru. Kharismatik bukan suatu gereja melainkan suatu aliran/gerakan yang memiliki banyak persamaan dengan gereja pentakosta namun tidak melembaga. Karena tidak melembaga, gerakan ini tidak memiliki sistem organisasi dan gedung gereja. Hanya mengadakan kebaktian, persekutuan doa dan pemahaman alkitab yang diadakan dirumah, hotel maupun mengadakan pertemuan dll berdasarkan faktanya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuta Tinggi mayoritas agama Kristen Protestan.

Adapun agama yang dianut masyarakat berdasarkan sukunya di kuta Tinggi adalah sebagai berikut

- (1) Islam, terutama dipeluk oleh suku Pakpak, Melayu dan Jawa
- (2) Kristen, terutama dipeluk oleh suku Pakpak dan Batak Toba

Walaupun hidup berdampingan dengan perbedaan agama tersebut, kehidupan masyarakat berlangsung dengan baik dan tentram. Justru dengan perbedaan itu menunjukkan bahwa mereka dapat hidup

berdampingan secara damai. Masyarakat di desa ini selalu hidup rukun dan harmonis tanpa adanya konflik yang berakibat pada timbulnya keretakan hubungan dengan agama lain sejak Desa ini berdiri. Konflik antar sesama masyarakat mungkin pernah terjadi 27 namun sebatas kesenjangan antar masyarakatnya sehingga tidak pernah memperpanjang masalah apalagi membawa agama. Karena sistem kekerabatan Suku Pakpak yang melekat pada tiap-tiap masyarakatnya memberikan pengaruh besar, membuat sifat masyarakatnya terbuka dan kondusif terhadap rasa persaudaraan walaupun berbeda agama maupun marga Bancein

Tabel 1.4
Jumlah Penganut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	176 jiwa
2	Kristen	654 jiwa

(Sumber: Pemerintahan Kantor Kepala Desa Kuta Tinggi Tahun 2023)

(c) Adat istiadat

Adat istiadat tidak akan pernah terpisahkan dari masyarakat, sebab dengan adanya budaya dan adat istiadat maka pola pikir dari masyarakat bisa terbentuk. Dengan adanya adat istiadat pula maka masyarakat dapat menonjolkan ciri khas yang dimilikinya. Sama halnya dengan masyarakat Pakpak yang berada di Desa Kuta Tinggi yang tidak terlepas dari budaya-budaya dan ciri khasnya.

Berdasarkan wilayah dan penyebarannya masyarakat Pakpak dibedakan menjadi 5 bagian yang menetap di beberapa daerah namun tetap terikat dengan kebiasaan-kebiasaan suku Pakpak lainnya yakni: Pakpak Simsim, Pakpak Keppas, Pakpak Kelasén, Pakpak Boang dan Pakpak Pegagan. Tiap tiap bagian memiliki hak dan menetap di wilayah masing-masing. Ada pun Pakpak Kelasén menetap di Humbang Hasundutan, Pakpak Boang menetap di wilayah Singkil terutama di Simpang Kiri dan Simpang Kanan. Sementara Pakpak Simsim, Keppas dan Pegagan menetap di wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Namun masyarakat yang mendiami wilayah Pakpak Bharat sampai ke pelosok desa nya

awalnya adalah murni suku Pakpak yakni Pakpak Simsim yang 134-135 29 mana dahulu Pakpak Bharat dikenal dengan Pakpak Simsim. Namun seiring berkembangnya zaman, masyarakat pendatang mulai memasuki wilayah Pakpak Simsim, terjadi kontak antara pendatang dengan penduduk setempat. Masyarakat Pakpak menikah dengan masyarakat luar dan ada juga yang sengaja mengubah marganya di pengunaantauan, dengan demikian tersebar lah beberapa suku-suku lain diantaranya suku Batak Toba, Jawa, Melayu dan lainnya

Selain bagian-bagian yang telah disebutkan di atas, masyarakat Pakpak yang termasuk Pakpak Simsim terbagi menjadi beberapa marga yang menetap di wilayah Kuta Tinggi, Kecamatan salak. Sistem kekerabatan Pakpak, menganut prinsip Patrilineal yang disebut marga maka pewarisan keturunan dominan hanya untuk laki-laki saja. Beberapa marga dari masyarakat yang mendiami Kuta Tinggi adalah marga Padang, Bancin, Berasa, Manik, Tinendung, Manik Kecupak, Gajah, Kebeakan, Lembeng, Sitakar, Berutu dan marga Solin. Desa Kuta Tinggi dominan ditempati oleh masyarakat yang bermarga Bancin.

(d) Sarana dan Prasana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang memungkinkan bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Kuta Tinggi untuk mensukseskan dan memajukan Desa Kuta Tinggi antara lain:

(1) Sarana Pendidikan

Untuk Sarana pendidikan di Desa Kuta Tinggi sangatlah kurang mumpuni, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Sarana Pendidikan Desa Kuta Tinggi

No	Pendidikan	Jumlah
1	Paud	2
2	SDN	1
3	SMP	1
4	SMA	-

(Sumber Pemerintahan Kantor Kepala Desa Kuta Tinggi Tahun 2023)

(2) Sarana Ibadah

Demi melangsungkan dan melancarkan peribadatan dalam beragama sarana ibadah sangat lah diperlukan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya masyarakat di Desa Kuta Tinggi menganut beberapa agama yakni Islam, Kristen Protestan, Katholik. Dan penduduk yang lebih banyak ada Kristen.

Tabel 1.6
Sarana Ibadah Desa Kuta Tinggi

No	Agama	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Islam	Masjid	1
2	Kristen	Gereja	3

(Sumber Pemerintahan Kantor Kepala Desa Kuta Tinggi Tahun 2023)

Berdasarkan data dan keterangan-keterangan yang telah diperoleh, selain sarana prasarana yang telah diuraikan di atas ada beberapa fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki yakni aula desa, Kas PAM, serta lapangan luas yang sewaktu-waktu digunakan untuk pergelaran acara-acara

(3) Sarana kesehatan

Sarana kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan yang harus dimiliki oleh setiap desa. Sarana kesehatan bukan hanya sebagai pelengkap melainkan kebutuhan sehingga memudahkan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dan memberikan pertolongan pertama apabila terjadi keadaan darurat.

Tabel 1.7
Sarana Kesehatan Desa Kuta Tinggi

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2		

(Sumber Pemerintahan Kantor Kepala Desa Kuta Tinggi Tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Kuta Tinggi dapat dikatakan telah memadai untuk memenuhi dan memberikan pertolongan pertama apabila sedang darurat. Fasilitas kesehatan tersebut berdasarkan data yang diambil dari kantor Kepala Desa Kuta Tinggi

B. Marga Bancin

1. Sejarah marga pakpak/ marga Bancin

Orang Pakpak berasal dari India Selatan yaitu dari Indika Tondal ke Muara Tapus dekat Dairi lalu berkembang di Tanah Pakpak dan menjadi Suku Pakpak. Pada dasarnya mereka sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal namun kemudian membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dengan marga aslinya. Tidak semua Orang Pakpak berdiam di atas Tanah Dairi namun mereka juga berdiaspora, meninggalkan negerinya dan menetap di daerah baru.

Sebagian tinggal di Tanah Pakpak dan menajadi Suku Pakpak “Situkak Rube;,”Sipungkah Kuta” dan “Sukut Ni Talun” di Tanah Pakpak. Sebagian ada pergi merantau ke daerah lain,membentuk komunitas baru.Dia tahu asalnya dari Pakpak dan diakui bahwa Pakpak adalah sukunya namun sudah menjadi marga di suku lain. Ada juga yang merantau lalu mengganti nama dan marga dengan kata lain telah mengganti identitasnya.

Nenek Moyang awal Pakpak adalah Kada dan Lona 3 yang pergi meninggalkan kampungnya di India lalu terdampar di Pantai Dairi dan terus masuk hingga ke Tanah Dairi, dari pernikahan mereka mempunyai anak yang diberi nama Hyang. Hyang adalah nama yang dikeramatkan di Pakpak. Hyang pun besar dan kemudian menikah dengan Putri Raja Dairi dan mempunyai orang Putra dan 1 orang Putri yaitu : Mahaji, Perbaju Bigo, Ranggar Jodi, Mpu Bada, Raja Pako, Bata, Sanggar, Suari (Putri).

Pada urutan ke 4 terdapat nama Mpu Bada, Mpu Bada adalah yang terbesar dari pada saudara-saudaranya semua, bahkan dari pihak Toba pun kadangkala mengklaim bahwa Mpu Bada adalah Keturunan dari Parna dari marga Sigalingging.

Anak Sulung, Mahaji mempunyai Kerajaan di Banua Harhar yang mana saat ini dikenal dengan nama Hulu Lae Kombih, Kecamatan Siempat Rube. Parbaju Bigo pergi ke arah Timur dan membentuk Kerajaan Simblllo di Silaan,saat ini dikenal dengan Kecamatan STTU Julu. Ranggar Jodi pergi ke arah Utara dan membentuk Kerajaan yang bertempat di Buku Tinambun dengan nama Kerajaan Jodi Buah Leuh dan Nangan Nantampuk Emas,saat ini masuk Kecamatan STTU Jehe.

Mpu Bada pergi ke arah Barat melintasi Lae Cinendang lalu tinggal di Mpung Si Mbentar Baju. Raja Pako pergi ke arah Timur Laut membentuk Kerajaan Si Raja Pako dan bermukim di Sicike-cike. Bata pergi ke arah Selatan dan menikah kemudian hanya mempunyai seorang Putri yang menikah dengan Putra Keturunan Tuan Nahkoda Raja.

Dari sini menurunkan marga Tinambunen, Tumangger, Maharaja, Turuten, Pinanyungen dan Anak Ampun. Sanggir pergi ke arah Selatan tp lebih jauh daripada Bata dan mmbentuk Kerajaan di sana, dipercaya menjadi nenek moyang marga Meka, Mungkur dan Kelasén. Suari Menikah dengan Putra Raja Dairi dan memdiam di Lebbuh Ntua. Marga Manik diturunkan oleh Mpu Bada yang mempunyai 4 orang anak yaitu : Tndang, Rea sekarang menjadi Banurea, Manik, Permencuari yang kemudian menurunkan marga Boang Menalu dan Bancin.

Pakpak biasanya dimasukkan sebagai bagian dari etnis Batak, sebagaimana Karo, Mandailing, Simalungun, dan Toba. Orang Pakpak dapat dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan wilayah komunitas marga dan dialek bahasanya, yakni:

1. Pakpak Simsim, yakni orang Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di daerah Simsim. Antara lain marga Berutu, Sinamo, Padang, Solin, Banurea, Boang Manalu, Cibro, Sitakar, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pakpak Kepas, yakni orang Pakpak yang menetap dan berdialek Keppas. Antara lain marga Ujung, Bintang, Bako, Maha, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Silima Pungga-pungga, Tanah Pinem, Parbuluan, dan Kecamatan Sidikalang di Kabupaten Dairi.
3. Pakpak Pegagan, yakni orang Pakpak yang berasal dan berdialek Pegagan. Antara lain marga Lingga, Mataniari, Maibang, Manik, Siketang, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, dan Kecamatan Tiga Lingga di Kabupaten Dairi.
4. Pakpak Kelasén, yakni orang Pakpak yang berasal dan berdialek Kelasén. Antara lain marga Tumangger, Siketang, Tinambunan, Anak Ampun, Kesogihen, Maharaja, Meka, Berasa, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Pakkat (di Kabupaten Humbang Hasundutan), serta Kecamatan

Dairi (di Kabupaten Tapanuli Tengah).

5. Pakpak Boang, yakni orang Pakpak yang berasal dan berdialek Boang. Antara lain marga Sambo, Penarik, dan Saraan. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Singkil (Nanggroe Aceh Darussalam).

Meskipun oleh para antropolog orang-orang Pakpak dimasukkan sebagai salah satu sub etnis Batak di samping Toba, Mandailing, Simalungun, dan Karo. Namun, orang-orang Pakpak mempunyai versi sendiri tentang asal-usul jatidirinya. Berkaitan dengan hal tersebut sumber-sumber tutur menyebutkan antara lain 8:

1. Keberadaan orang-orang Simbelo, Simbacang, Siratak, dan Purbaji yang dianggap telah mendiami daerah Pakpak sebelum kedatangan orang-orang Pakpak.
2. Penduduk awal daerah Pakpak adalah orang-orang yang bernama Simargaru, Simorgarorgar, Sirumumpur, Silimbiu, Similang-ilang, dan Purbaji.
3. Dalam lapiken/laklak (buku berbahan kulit kayu) disebutkan penduduk pertama daerah Pakpak adalah pendatang dari India yang memakai rakit kayu besar yang terdampar di Dairi.
4. Persebaran orang-orang Pakpak Boang dari daerah Aceh Singkil ke daerah Simsim, Keppas, dan Pegagan.
5. Terdamparnya armada dari India Selatan di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Dairi, yang kemudian berasimilasi dengan penduduk setempat.

Berdasarkan sumber tutur serta sejumlah nama marga Pakpak yang mengandung unsur keindiaan (Maha, dan Maharaja), boleh jadi di masa lalu memang pernah terjadi kontak antara penduduk pribumi Pakpak dengan para pendatang dari India. Jejak kontak itu tentunya tidak hanya dibuktikan lewat dua hal tersebut, dibutuhkan data lain yang lebih kuat untuk mendukung dugaan tadi. Oleh karena itu maka pengamatan terhadap produk-produk budaya baik yang tangible maupun intangible diperlukan untuk memaparkan fakta adanya kontak tersebut. Selain itu waktu, tempat terjadinya kontak, dan bentuk kontak yang bagaimanakah yang mengakibatkan wujud budaya dan tradisi masyarakat Pakpak sebagaimana adanya saat ini. Untuk itu diperlukan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan sejumlah fenomena budaya yang ada.

Belum ditemukan bukti yang otentik dan pasti tentang asal usul dan sejarah persebaran orang Pakpak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa

variasi. Pertama dikatakan bahwa orang Pakpak berasal dari India selanjutnya masuk ke pedalaman dan beranak pinak menjadi orang Pakpa. Versi lain menyatakan orang Pakpak berasal dari etnis Batak Toba dan yang lain menyatakan orang Pakpak sudah ada sejak dahulu.

Mana yang benar menjadi relatif karena kurang didukung oleh fakta-fakta yang objektif. Alasan dari India misalnya hanya didasarkan pada adanya kebiasaan tradisional Pakpak dalam pembakaran tulang-belulang nenek moyang dan Dairi sebagai daerah pantai dan pusat perdagangan berbatasan langsung dengan tanah Pakpak. Alasan Pakpak berasal dari Batak Toba hanya adanya kesamaan struktur sosial dan kemiripan nama-nama marga.

Alasan ketiga yang menyatakan dari dahulu kala sudah ada orang Pakpak hanya didasarkan pada folklore di mana diceritakan adanya tiga zaman manusia di Tanah Pakpak, yakni zaman Tuara (Manusia Raksasa), zaman si Aji (manusia primitif) dan zaman manusia (homo sapien).

Berdasarkan dialek dan wilayah persebarannya, Pakpak dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian besar yakni: Pakpak Simsim, Pakpak Keppas, Pakpak Pegagan, Pakpak Boang dan Pakpak Kelasén. Masing-masing sub ini dibedakan berdasarkan hak ulayat marga yang secara administratif tidak hanya tinggal atau menetap di wilayah Kabupaten Dairi (sebelum dimekarkan), tetapi ada yang di Aceh Singkil, Humbang Hasundutan (sebelum dimekarkan dari Pakpak Bharat) dan Tapanuli Tengah.

Pakpak Simsim, Pakpak Keppas dan Pegagan secara administratif berada di wilayah kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, sedangkan Pakpak Kelasén berada di kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Manduamas. Berbeda lagi dengan Pakpak Boang yang menetap di wilayah kabupaten Singkil, khususnya di Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Simpang Kanan.

Marga-marga Pakpak yang termasuk Pakpak Simsim, misalnya: marga Berutu, Padang, Bancin, Sinamo, Manik, Sitakar, Kebeaken, Lembeng, Cibro, dan lain-lain. Marga Pakpak Keppas misalnya: marga Ujung, Capah, Kuda diri, Maha dan lain-lain. Marga Pakpak Kelasén misalnya: Tumangger, Tinambunen, Kesogihen, Meka, Maharaja, Ceun, Mungkur dan lain-lain. Marga Pakpak Boang, misalnya: Saraan, Sambo, Bacin dan lain-lain.

Pemegang hak Adat Pakpak “Sulang Silima” di wilayah Pakpak Pegagan adalah

marga Matanari di wilayah Balna Sikabeng-kabeng Kuta Gugung, marga Manik di wilayah Kuta Manik dan Kuta Usang, dan marga Lingga di wilayah Kuta Raja dan Kuta Posong. Tidak ada kuta di wilayah/daerah Pakpak Pegagan yang unsur-unsur “Sulang Silima” nya marga Padang Batak.

Rumah Adat Pakpak yang hanya dapat dimiliki Raja Kuta (pemegang hak Wilayah) diantaranya dijumpai di Balna Sikabeng-kabeng, yakni dinamai “Rumah Sipitu Ruang Kurang Dua Lima Puluh” dan di depan rumah tersebut terdapat Bale Adat Pakpak dinamai “Bale Silendung Bulan”. Rumah dan Bale Adat Pakpak ini hancur dikarenakan Angin Topan dan simakan usia pada tahun 1984. Marga Manik dan Lingga mengakui abang mereka (paling tua) adalah pemilik wilayah Balna Sikabeng-kabeng Kuta Gugung yaitu marga Matanari Pakpak Pegagan.

Tidak diberikan izin membangun Rumah Adat Pakpak di segala dusun/desa. Misalnya, dusun Sikonihan dekat kota Sumbul adalah dusun perantauan (pengembangan) marga Matanari. Didusun/desa ini dahulu tidak diijinkan didirikan Rumah Adat Pakpak, walaupun kuta (kampung) marga Matanari juga. Rumah adat Pakpak dahulu ada di Balna Sikabengkabeng dan Kuta Gugung. Rumah Adat Pakpak yang di Kuta Gugung dahulu dibakar saat perang saudara, sedangkan Rumah adat Pakpak yang di Balna Sikabeng-kabeng hancur akibat Angin Topan 1984 dan lapuk termakan usia.

Wilayah Pakpak Keppas diawali yang dari daerah Sicikeh-cikeh (daerah Parawisata-Hutan Lindung) hingga meluas ke daerah Sitinjo (marga Capah) ke Simpang Tolu (marga Kudadiri), daerah Sisikalang (marga Ujung), Sidiangka (marga Angkat) wilayah Bintang-Pancuran (marga Bintang). Marga Sinamo dan Gajah Manik pergi dan tinggal ke wilayah Pakpak Simsim.

Wilayah Pakpak Simsim adalah kabupaten Pakpak Bharat (dahulu hanya terdiri dari kecamatan Kerajaan dan kecamatan Salak). Marga-marga Pakpak Simsim antara lain adalah Solin, Padang, Bancin, Banurea, Barasa (Brasa), Brutu, Manik Kecupak, Gajah, Kabeakan, Lembeng, Sitakar, Tinendung, maupun Padang Batanghari.

Wilayah Pakpak Kelasén adalah daerah Parlilitan dan sekitarnya terdiri dari beberapa marga antara lain Tinanbunan, Tumangger, Maharaja, Turutan, Pinayungan, Anak Ampun (Nahampun). Meka, Mahulae, Buatón, Kesugihen. Siketang, dan lain lain. Sedangkan Pakpak Boang adalah di daerah Boang, Singkil dan daerah Aceh.

Selain alasan faktor tersebut di atas, pada umumnya marga-marga Pakpak Pegagan (Matanari, Manik dan Lingga) akibat letak daerahnya sangat dekat dengan wilayah tanah Karo, Simalungun dan Samosir dan Humbang maka sudah beberapa generasi mereka (Pakpak Pegagan terutama marga Matanari) telah kawin mayoritas dengan suku Batak Toba. Lambat laun bahasa yang digunakansehari-hari adalah bahasa Batak Toba, dan adat istiadat dipakai adalah Adat Batak Toba (karena hula hula dan Boru hampir semuanya suku Batak Toba). Dalam menjalankan Adat Batak Toba, marga Matanari membutuhkan saudara semarga. Kenyataan ini menyebabkan marga Matanari dan Pakpak Pegagan lainnya (Manik dan Lingga) telah lama mengaku keturunan marga Sihotang. Dan akhirnya pengaruh marga-marga keturunan Si Raja Oloan juga berpengaruh kuat terhadap marga Matanari (terutama di perantauan). Kenyataan yang sebenarnya adalah marga Matanarilah yang memberikan tanah (parhutaan) kepada marga Sihotang yaitu huta Sihotang Nahornop dekat daerah Balna Sikabeng-kabeng.

Sebelum kuat pengaruh Sihotang di wilayah Pakpak Pegagan (Matanari, Manik dan Lingga) dan Naibaho di wilayah Pakpak Keppas (Ujung, Angkat, Bintang, Kudadiri, Capah, Sinamo, dan Gajah Manik), maka antar marga-marga suku Pakpak di atas masih saling kawin. Misal Matanari kawin dengan marga Bintang, atau Capah ataupun marga Lingga. Adek perempuan Ranimbani boru Matanari (istri Loho Raja) ada dua orang, masing-masing kawin dengan marga Bintang dan marga Maha. Marga Maha adalah suku Pakpak yang mengaku dirinya marga Silalahi dan Sembiring Maha di Tanah Karo.

Akibat jumlahnya relatif sedikit maka pada umumnya banyak suku Pakpak merubah marganya di perantauan. Misalnya marga Matanari yang merantau ke Tanah Karo, Tigalingga dan Tanah Pinem merubah marganya menjadi Karo-karo, Sitepu, Sinulingga, dan lain lain. Marga Matanari yang merantau ke daerah Deli, Riau, Jambi, Benhgkulu, pulau Jawa, Irian jaya dan lain lain ada yang merubah marganya menjadi marga Sihotang.

BAB IV

PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS MARGA BANCIN DALAM PILKADES DI DESA KUTA TINGGI

Bab ini membahas tentang bentuk politik identitas yang digunakan oleh masing-masing calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa tahun 2022 dengan fokus penelitian di desa Kuta Tinggi. Uraian selengkapnya terkait dengan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana bentuk politik identitas digunakan untuk mobilisasi suara pada pemilihan kepala desa 2022 di desa Kuta Tinggi, sebagai berikut:

A. Bentuk Politik Identitas yang Digunakan Pada Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi

Ahmad Syafii Maarif menjelaskan di dalam bukunya, bahwa isu politik identitas menarik untuk dibahas oleh para ilmuwan sosial pada awalnya tentang minoritas, gender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan serta teraniaya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, pembahasan tentang politik identitas ini meluas mengenai masalah marga, kepercayaan, dan ikatan ikatan kultural yang beragam. Politik identitas pembahasan utamanya adalah pada bagian tentang politisasi identitas bersama, atau perasaan “kekitaan” untuk meningkatkan rasa kekompakan di dalam sebuah kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara radikal, yang tujuannya untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa “sama”, baik secara ras, etnis, marga, ataupun elemen lainnya yang dapat menjadi sebuah perekat di antara semua anggota kelompok. Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi, yang termasuk dalam bagian penting di dalam politik identitas untuk dapat memproduksi dan mendistribusikan ide “kebaikan” diantara semua anggota kelompok, kemudian di sisi lain juga bisa menjadi penutup nalar perlawanan atau kritis anggota dari kelompok identitas tertentu.

Bentuk dari politik identitas yang digunakan pada pemilihan kepala desa tahun 2022 di desa Kuta Tinggi muncul karena adanya isu yang berkembang selama masa kampanye. Kemudian adanya sentimen marga yang terjadi di masyarakat juga menjadi pemicu adanya bentuk politik identitas pada pemilihan kepala desa 2022. Penjelasannya dibawah ini sebagai berikut:

1. Isu yang berkembang selama masa kampanye

Menurut Harrison di dalam bukunya Rachmat Kriyantono, mengatakan bahwa isu merupakan “berbagai perkembangan, biasanya terdapat di dalam arena publik, yang jika berlanjut dapat secara signifikan dapat mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari sebuah organisasi”. Secara sederhana, isu dapat menjadi penyebab sebuah konflik apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Maksudnya adalah, isu dapat dijadikan sebuah cara untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi atau kelompok yang menggunakan isu untuk dapat mencapai tujuan kepentingan sebuah kelompok tertentu, di segala aspek kehidupan. Termasuk di dalam sebuah aspek politik.

Politik yang setiap waktunya selalu ada kepentingan dari semua kelompok yang terlibat, selalu menggunakan isu untuk dapat melancarkan urusannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, pemilihan kepala desa 2022 memunculkan sangat banyak isu yang beredar luas di masyarakat.

Isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan) masih menjadi isu yang digunakan dan berkembang di masyarakat selama masa kampanye pemilihan kepala desa 2022. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami adanya isu SARA yang terjadi. Selama masa kampanye masih didominasi oleh kampanye yang mengkapitalisasi isu-isu SARA, politik identitas, serta terkait isu-isu yang tidak substantif. Alih-alih mendorong proses pemilihan umum yang berkualitas, fenomena ini justru semakin menambah polarisasi di masyarakat, bahkan disinyalir semakin mendorong apatisme terhadap pemilihan kepala desa.

Isu yang berkembang di masyarakat selama masa kampanye pemilihan kepala desa. Desa Kuta Tinggi tergolong desa yang majemuk, kemajemukan itu salah satunya ditandai dengan adanya empat marga yang berbeda yaitu, marga Bancin, marga Berutu, marga Banurea, dan marga Padang. Maka menarik kemudian dalam karya ilmiah ini, peneliti ingin mengumpulkan suatu informasi terkait penggunaan politik identitas marga Bancin dalam kontestasi politik lokal di desa Kuta Tinggi. Dalam rangkaian proses penelitian ini dimana salah satunya adalah kegiatan observasi lapangan dengan didasarkan pada pengamatan, maka diperoleh suatu gambaran bahwa ke empat marga Bancin yang terdapat di desa Kuta Tinggi terlibat dalam suatu agenda politik pilkades. Keterlibatan itu selain ditunjukkan dalam partisipasi pencalonan diri maupun partisipasi dalam pemilihan bagi individu-

individu yang memiliki hak memilih. Menurut data observasi yang dilakukan, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Marga Bancin tergolong marga yang secara kuantitas penduduknya lebih banyak dibandingkan marga lainnya. Dalam setiap periode kontestasi politik pilkades, keterwakilan marga Bancin lebih mendominasi dalam menduduki jabatan kepala desa Kuta Tinggi” (Hasil pengamatan, 06 Juni 2023).

Dari hasil pengamatan tersebut secara jumlah marga Bancin mendominasi dan dalam agenda politik seperti penyelenggaraan kontestasi pilkades marga Bancintersebut unggul. Identitas memungkinkan mengambil suatu penggunaan penting didalam kesuksesan mencapai kekuasaan tersebut. Mengutip Faktor utama mengapa kandidat menggunakan isu identitas dalam menarik simpati karena adanya factor sosiologis dari perilaku pemilih yang cenderung memilih kandidat berdasarkan dari marga Bancin yang sama.

Sementara hal lain, marga Bancin selain unggul secara kuantitas penduduknya dalam hal strategi kemenangan diterapkan suatu sistem yang tergolong sistemik dan terorganisir. Berikut ini adalah hasil pengamatan strategi dalam memenangkan kontestasi pilkades khususnya marga Bancin:

“Suatu sistem kekeluargaan dalam marga Bancin yang kuat, hal ini dimanfaatkan oleh kontestan dengan menyatukan kekuatan dalam marga Bancin sebagai basis. Di dalamnya adalah menyangkut hal komitmen untuk memilih kontestan berdasarkan marga Bancin” (Hasil pengamatan, 06 Juni 2023).

Dari pengamatan diatas dapat dikatakan bahwa politisasi identitas dilakukan karena adanya pencarian massa yang dilakukan oleh elit-elit politik. Mereka kerap melakukan pemetaan pemilih berdasarkan perilaku politik pemilih. Hal ini dijelaskan dalam teori milik Daniel N. Posner (2007). Teori ini menjelaskan ada dua kecenderungan elit politik menggunakan isu-isu identitas. Kandidat-kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap marga Bancin menjelang arena pemilihan. Target yang menjadi sasaran adalah marga Bancin yang bersangkutan maupun yang berdekatan dengan marga Bancin tersebut.

Konfigurasi antara kuantitas penduduk yang mendominasi dengan strategi yang sangat apik adalah kombinasi yang terukur dan berhasil terkhusus marga Bancin. Dalam pengamatan penulis, hal seperti ini kerap dilakukan dan sudah turun temurun dan sulit ditinggalkan karena menyangkut peluang kemenangan. Sementara itu, dari hasil observasi lapangan berkaitan dengan penggunaan politik identitas dalam marga Bancin Marga padang, Jombok dan Pa“ang memiliki catatan sejarah yang sama. Sebagai marga mayoritas meskipun menerapkan suatu strategi

kemenangan seperti yang digunakan oleh marga Bancin, hal itu tidak bisa mencapai kesuksesan dalam perebutan kekuasaan.

“Marga Bancin menduduki jabatan kepala desa karena suatu kenyataan bahwa ketiga marga lainnya merupakan minoritas” (Hasil pengamatan, 06 Juni 2023).

Tidak bisa disangkal bahwa, politik identitas di beberapa daerah kerap menjadi alat politik untuk menjaring massa. Pada masyarakat pedesaan yang solidaritas kekeluargaannya kuat, memiliki suatu kecenderungan memilih berdasarkan marga Bancin. Oleh elit-elit politik yang haus kekuasaan memilih memanfaatkan hal tersebut sebagai basis kekuatan. Dalam suatu kesempatan, peneliti mewawancarai salah seorang Tokoh Adat desa Kuta Tinggi yaitu Bapak AA (72 Tahun) dan berikut kutipan wawancaranya:

“Penggunaan marga Bancin bisa dikatakan berpengaruh dalam pilkades di desa Kuta Tinggi, apalagi pada masyarakat pedesaan ikatan primordialnya sangat tinggi” (Hasil wawancara, 06 Juni 2023).

Dari kutipan wawancara diatas, narasumber menguatkan argumennya yang mengatakan penggunaan marga Bancin dalam pilkades memiliki pengaruh dengan mengaitkan primordialisme. Primordialisme kita ketahui bersama bahwa merupakan suatu ikatan yang terbentuk secara alamiah dalam suatu kelompok atau marga Bancin. Ikatan primordialisme tersebut kemudian hadir sebagai suatu orientasi pemilih dalam memilih calon pada pilkades. Untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait penggunaan politik identitas marga Bancin di desa tersebut, peneliti juga mewawancarai salah seorang masyarakat yang Bapak ZF (29 Tahun) dan berikut kutipan wawancaranya:

“Politik identitas sangat jelas memiliki penggunaan penting dalam strategi memenangkan calon. Di desa Kuta Tinggi khususnya, masing-masing calon melakukan pendekatan dengan kelompok marga Bancinnya yang tujuannya adalah mengumpulkan kekuatan atau menguatkan basis dalam memenangkan pilkades” (Hasil wawancara, 06 Juni 2023).

Berikut ini juga pernyataan yang disampaikan oleh Tokoh Adat desa Kuta Tinggi AA (72 Tahun) terkait penggunaan politik identitas marga Bancin pada saat pilkades:

“Seperti biasanya kontestan dalam pilkades melakukan pendekatan dengan sesama marga Bancinnya. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan. Dalam pertemuan tersebut sangat kuat nilai budaya di dalamnya yakni dengan dirangkaikan do'a” (Hasil wawancara, 06 Juni 2023).

Dari kutipan wawancara tersebut, bahwa politik identitas ikut mewarnai kontestasi pilkades di desa Kuta Tinggi. Pada saat kampanye, calon dari masing-masing marga Bancin menguatkan basis dengan kelompoknya. Menurut hemat

penulis, hal tersebut sangat situasional dengan melihat realitas masyarakat yang memiliki struktur marga Bancin. Upaya mobilisasi massa dalam kasus ini merupakan tergolong politisasi SARA. Sementara jika mengacu pada hukum Undang-Undang positif, pada pasal 16 mengatur tentang mekanisme kampanye calon kepala desa yang diantaranya adalah: materi kampanye dilarang mengandung isu SARA.

Berkaitan dengan penggunaan politik identitas marga Bancin di desa Kuta Tinggi, peneliti mewawancarai salah seorang masyarakat desa Kuta Tinggi yaitu Ibu SS (55 Tahun) yang memiliki hak suara dalam penyelenggaraan pilkades di desa tersebut dan berikut ini adalah pernyataannya:

“saya kalau ditanya pilih siapa saat pilkades, saya jawab pasti saya akan memilih orang terdekat secara marga Bancin” (Hasil wawancara, 07 juni 2023).

Berikut ini juga pernyataan Bapak AM (58 Tahun) terkait preferensi memilihnya pada saat pilkades:

“Secara pribadi saya akan memilih sesuai dengan marga Bancin saya. Komitmen yang sudah dibentuk dalam pertemuan tersebut adalah menjadi landasan kuat siapa yang saya dan kami pada umumnya dalam pemilihan” (Hasil wawancara, 07 juni 2023).

Dalam kutipan wawancara di atas, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu dewasa ini, khususnya pada politik lokal di desa Kuta Tinggi terdapat satu dari tiga hal pelanggaran yang sering terjadi khususnya pada saat kampanye yaitupolitisasi SARA. Pernyataan informan tersebut menjadi satu bukti pengaruh dari penggunaan politik identitas marga Bancin. Politik uang, politisasi SARA dan HOAX, ketiga hal tersebut adalah upaya yang mencederai keberlangsungan demokrasi yang notabenenya adalah negara ini masih dalam suatu masa transisi dari otoritarianisme menuju sistem yang demokratis. Bapak AM (58 Tahun) dalam suatu kesempatan wawancara menyatakan:

“Politik identitas tidak bisa dihindari dalam masyarakat khususnya di desa Kuta Tinggi, karena ini sudah menjadi hal yang turun temurun. Makanya tidak heran dalam memilih pemimpin acap kali didasarkan pada identitas” (Hasil wawancara, 07 juni 2023).

Seperti yang dibahasakan pada latar belakang penelitian, dari keempat marga Bancin di desa Kuta Tinggi terdapat salah satu marga Bancin yaitu marga Bancin yang secara kuantitas penduduknya terbanyak. Dalam suatu wawancara, Bapak AE (50 Tahun) memberikan informasi sebagai berikut:

“Marga Bancin memang merupakan marga terbanyak di desa Kuta Tinggi, ia mendominasi marga lainnya. Untuk jabatan kepala desa Kuta Tinggi,

perwakilan marga Bancin seingkali memenangkan pilkades” (Hasil wawancara, 07 juni 2023).

Dari kutipan wawancara tersebut, semakin menguatkan bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi kemenangan calon kepala desa dari marga Bancin adalah faktor jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan marga Bancin lainnya. Pernyataan ini didukung oleh informasi diatas sebelumnya yang menegaskan bahwa dalam matari kampanye masing-masing marga Bancin menggunakan politisasi SARA dalam hal ini politisasi marga Bancin. Berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dan dipertahankan secara refleksif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21).

Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bias dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis. Mengutip (Widayanti, 2009: 20) disaat adanya politisasi identitas, identitas itu bergerak kepentingan. Identitas yang pada mulanya adalah base onidentity dan on inmarga Bancinst telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Salah seorang tokoh pemuda desa Kuta Tinggi yaitu RT (25 Tahun) dalam suatu kesempatan wawancara, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Hal ini sudah menjadi sesuatu hal yang biasa khususnya dalam pilkades di desa Kuta Tinggi. Politisasi marga Bancin tidak dianggap sebuah pelanggaran karena kecenderungan masyarakat adalah memilih berdasarkan persamaan marga Bancin karena pada masyarakat yang majemuk di desa ini memiliki nilai solidaritas tinggi dalam masing-masing marga Bancin” (Hasil wawancara, 07 Juni 2023).

Dari kutipan wawancara tersebut, politik identitas bukan lagi hal baru dalam kontestasi politik di desa Kuta Tinggi. Praktek politisasi marga Bancin tersebut sudah menjadi bagian penting untuk memobilisasi massa yang dimuat dalam materi kampanye masing-masing calon. Kondisi sosiokultural masyarakat desa Kuta Tinggi yang menjunjung nilai primordial atau ikatan kekeluargaan menjadi potensi yang kemudian dikonstruksikan dalam kampanye politik untuk kemudian masyarakat digiring memilih beerdasarkan marga Bancin. Instrumentalisme lebih menekankan perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas atribut awal seperti marga Bancin, kebangsaan, agama, ras dan bahasa (Aini dalam Kinasih, 2005).

Berikut ini pernyataan salah seorang tokoh pemuda desa Kuta Tinggi, Bapak JM (29 Tahun): “Masyarakat desa Kuta Tinggi tau betul bahwa mereka memiliki

perbedaan etni satu dengan lainnya. Dalam suasana tahun politik biasanya dijadikan basis oleh yang berkepentingan untuk memilih berdasarkan garis keturunan” (Hasil wawancara, 06 Juni 2023).

Dari pernyataan informan di atas, dalam pendekatan instrumentalis menjelaskan bahwa makna politik marga Bancin adalah upaya melakukan politisasi marga Bancin dalam rangka mengejar kepentingan politik. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward Aspinall (2011) yang menjelaskan bahwa politik marga Bancin merupakan upaya untuk melakukan mobilisasi atau menggunakan marga Bancin dengan berdasarkan pada kesadaran akan adanya perbedaan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Kesadaran tersebut yang merupakan hasil konstruksi dari politisasi marga Bancin menjadi basis dalam merebut kekuasaan.

Tindakan manipulasi marga Bancin dalam memobilisasi masa pada pilkades di desa Kuta Tinggi sudah menjadi sesuatu yang turun temurun (given) tidak bisa dibantah. Salah seorang informan saudara AS (22 Tahun) memberikan informasi sebagai berikut:

“Ini adalah bagian dari strategi politik, kondisi masyarakat yang multimarga Bancin seperti ini menjadi modal sebagai basis dan kita tidak tau kapan berakhirnya” (Hasil wawancara, 06 Juni 2023).

Dari pernyataan tersebut, politik identitas sudah tumbuh dan terus dipakai dalam strategi politik memenangkan pilkades di desa Kuta Tinggi. Perspektif instrumentalisme, dalam pandangan ini identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal marga Bancin seperti kebangsaan, agama, ras, dan Bahasa (Aini dalam Kinasih, 2005).

B. Strategi Pemilihan Kepala desa Kuta Tinggi

Dari berbagai wawancara dan observasi diperoleh informasi bahwa polititik identitas marga Bancin memiliki pengaruh yang besar dalam setiap pilkades di desa Kuta Tinggi. Ada tiga hal pokok dalam strategi kemenangan masing-masing calon kepala desa, penulis dalam memudahkan penelitian ini menggunakan tiga pendekatan

yaitu tindakan manipulasi dan mobilisasi, dominasi sosial dan solidaritas politik. Ketiga pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tindakan manipulasi dan mobilisasi

Penggunaan politik identitas marga Bancein dalam penerapannya sangat sistemik dan terorganisir yakni seperti yang dipaparkan dalam sub hasil penelitian diatas merangkul individu yang berdasarkan kesamaan marga Bancein untuk menguatkan basis kemenangan. Realitas politik identitas tersebut sudah turun temurun atau sesuatu yang given. Masyarakat dalam memilih pemimpin pada akhirnya kecenderungannya adalah orientasi marga Bancein. Pada masyarakat yang multi marga Bancein seperti di desa Kuta Tinggi menjadi sangat mungkin dengan melihat realitas politisasi marga Bancein yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan.

Berdasarkan teori instrumentalisme di atas, elit-elit yang kerap menggunakan identitas marga Bancein dalam penyelenggaraan kontestasi tersebut adalah dengan melihat struktural masyarakat yang tersusun berdasarkan klasifikasi marga Bancein. Hal ini memang tidak heran, hemat penulis bahwa politisasi identitas bukan sesuatu hal yang baru dalam sejarah demokrasi negeri ini. Jika melihat strategi elit-elit politik di desa Kuta Tinggi sangat terorganisir, pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam ruang sosialisme dilakukan secara intens.

Dari pendekatan instrumentalisme tersebut menjelaskan bahwa makna politik marga Bancein dalam penelitian ini adalah upaya melakukan politisasi marga Bancein dalam rangka mengejar kepentingan politik. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward Aspinall (2011) yang menjelaskan bahwa politik marga Bancein merupakan upaya untuk melakukan mobilisasi atau menggunakan marga Bancein dengan berdasarkan pada kesadaran akan adanya perbedaan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh kekuasaan negara, mempengaruhi kebijakan pemerintah, maupun mempengaruhi struktur dari institusi Negara.

Teori instrumentalisme yang dicetus oleh Paul Brass dan David Brown, berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara reflektif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21). Sehingga disaat identitas bergeser ke arah

kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis. Disaat adanya politisasi identitas, identitas itu bergerak kepentingan, identitas yang pada mulanya adalah *base on identity* dan *base on inmarga* Bancinst telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpatidari masyarakat. Jadi dasar terjadinya politik identitas karena adanya suatu kelompok yang memiliki berbagai kepentingan.

Realitas politik identitas tersebut, dapat dilihat bahwa marga Bancin khususnya di desa Kuta Tinggi dipolitisasi atau dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mengejar keuntungan ekonomi dan politik. Pada aspek ini, marga Bancin tidak lagi sebagai kelompok marga Bancin berjuang melakukan upaya afirmasi. Namun lebih daripada itu, identitas marga Bancin dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengejar kepentingan politik. Hal ini sangat menarik untuk dicermati karena memperlihatkan suatu paradoks demokrasi dimana pada satu sisi kebebasan dan keberagaman semua kelompok harus dijamin, namun di sisi lain ternyata kebebasan dan keberagaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu.

2. Dominasi sosial

Manusia sebagai makhluk multidimensi memiliki perbedaan-perbedaan berdasarkan beberapa kriteria yang terdiri dari cirri fisiologis, kebudayaan, ekonomi dan perilaku (Kinloch via Kamanto Sunarto, 1993). Perbedaan ini menyebabkan manusia masuk ke dalam kelompok-kelompok sosial tertentu sehingga tercipta masyarakat multikultural. Desa Kuta Tinggi seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa tergolong multi marga Bancin, dimana tiap-tiap individu mengidentifikasikan dirinya di dalam masyarakat berdasarkan marga Bancin. Teori dominasi sosial yang dicetuskan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto, menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hirarki sosial. Hal ini berarti terdapat sejumlah individu atau kelompok yang memiliki kedudukan berbeda yaitu kelompok individu atau dominan yang berada pada bagian atas hirarki dan kelompok atau subordinat yang berada d bawah hirarki. Teori ini menggambarkan realitas yang terjadi di desa Kuta Tinggi, ada smarga Bancinotif, diskriminasi dan intimidasi. Dalam pandangan teori ini yang menyangkut kedudukan atau jabatan, pada masyarakat desa Kuta Tinggi dimana menjamurnya polititisasi etnik memungkinkan terjadinya diskriminasi yang

dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas atau dalam teori ini terdapat suatu proposisi kelompok dominan dengan subordinat.

Berdasarkan teori Sidanius dan Pratto, konsep terbesar dari kerangka berpikir orientasi dominasi sosial terdiri atas dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang cenderung disusun berdasarkan kelompok-kelompok hierarki, dimana paling tidak terdapat satu kelompok atau individu yang berada di atas dan satu kelompok atau individu yang berada dibawahnya. Asumsi kedua, hierarki atau tingkatan dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kebangsaan dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai pembeda diantara kelompok atau individu yang berbeda. Marga Bancin yang merupakan marga Bancin dominan kerap menggunakan politisasi marga Bancin sebagai strategi memenangkan calon. Jumlah penduduk marga Bancin yang dominan dimanfaatkan sebagai basis sehingga masyarakat preferensi memilihnya berdasarkan marga Bancin. Strategi tersebut dengan kuasa dominasi yang dimiliki memiliki pengaruh dan buktinya adalah sejak periode pertama pelaksanaan pilkades di desa Kuta Tinggi hingga periode sekarang marga Bancin keterwakilannya lebih banyak menduduki jabatan.

Manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk hirarki berdasarkan kelompok-kelompok sosial dimana setidaknya terdapat satu kelompok yang menikmati status sosial yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kelompok lain. Anggota kelompok sosial dominan akan menikmati bagian yang lebih besar dari nilai sosial positif, atau materi yang diinginkan yang berasal dari sumber-sumber tertentu seperti kekuasaan politik, kekayaan, perlindungan dengan kekuatan dan lain sebagainya. Menyoroti realitas di desa Kuta Tinggi, marga Bancin dominan yaitu mendominasi kedudukan sebagai birokrat pemerintahan desa Kuta Tinggi. Hal tersebut merupakan tindakan politis demi mewujudkan keuntungan ekonomi dan hal lainnya. Kekuasaan politik yang dimiliki oleh sebagian besar marga Bancin adalah suatu wujud dominasi kekuasaan sehingga anggota kelompok tersebut memperoleh bagian yang lebih besar.

3. Solidaritas politik

Ost (1998) dalam *Solidarity and The Politics Of Anti Politics: Opposition And Reform In Poland Since 1968*, menyebutkan bahwa solidaritas politik merupakan

gejala postmodern politik. Gejala ini ditandai dengan akomodirnya kekuatan sosial dalam politik. Ost melihat politik sebagai alat dan tujuan sekaligus. Karena sebagai alat dan tujuan sekaligus maka politik memang harus menyertakan banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek itu harus disertakan agar elit politik bisa mendapatkan kekuasaan dalam alam liberalisasi politik. Masuknya marga Bancin dalam politik lokal di desa Kuta Tinggi adalah suatu gambaran bahwa marga Bancin merupakan sebagai alat dan tujuan dalam merebut kekuasaan politik.

Gerakan sosialisme semu dianggap mampu mencapai tujuan itu. Dengan demikian warga Kuta Tinggi sebagai konstituen dibuat dan dilakukan sama seperti logika sosialis. Berikutnya adalah menggunakan semua potensi dalam alam sosialisme itu untuk mencapai tujuan. Maka marga Bancin digunakan untuk tujuan politik solidaritas politik diikat dengan tali sosial budaya di ruang sosialisme. Sosialisme semu adalah gejala dimana nilai sosialisme dipakai untuk tujuan politik. Sosialisme semu di desa Kuta Tinggi ditunjukkan dengan melakukan pertemuan yang intens di dalam suatu kelompok. Gagasan ini dipelopori oleh elit-elit politik, dengan pertemuan tersebut komitmen untuk memenangkan kontestasi yang dibangun oleh kolektivitas kelompok marga Bancin dimungkinkan berpeluang besar untuk mencapai tujuan.

Hal tersebut di atas bisa dikatakan suatu realitas politik fragmentatif. Yang muncul kemudian adalah bukan solidaritas sosial tetapi solidaritas politik. Solidaritas sosial memunculkan soliditas sosial sedangkan solidaritas politik berujung pada terpusatnya kekuasaan karena kepentingan tertentu. Dalam ruang solidaritas politik kegiatan politik diarahkan untuk tujuan kelompok bukan tujuan bersama. Jika melihat gerak-gerik elit politik lokal desa Kuta Tinggi, sulit untuk tidak mengatakan bahwa solidaritas politik kental menghiasi ruang politik.

C. Proses Pemilihan Kepala Desa Kuta Tinggi

1. Memenuhi kriteria calon kepala desa secara umum

Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada panitia pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang ditetapkan. Hasil penjarangan setelah dilengkapi dengan berkas persyaratan kemudian dilakukan penyaringan. Proses penjarangan calon kepala desa dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data persyaratan masing-masing calon dan syarat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah No.7 Tahun 2007 berupa:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Tidak Pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat pertama atau sederajat.
- e. Berumur sekurang kurangnya 25 (dua puluh Lima) tahun dan setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana.
- h. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
- i. Bersedia di calonkan menjadi kepala desa.
- j. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan.

2. Melengkapi berkas dan mendaftar ke kpu

Apabila seseorang yang diusulkan atau berniat mencalonkan diri telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan sebelumnya seperti kelengkapan identitas pribadi, dia juga perlu melengkapi berkas-berkas lainnya. Berkas yang dimaksud berupa pernyataan-pernyataan tertulis dari berbagai instansi seperti:

- a) Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat.
- b) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari kantor polisi.
- c) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d) Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama tiga kali masa jabatan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat.
- e) Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala desa.
- f) Surat pernyataan bersedia menanggung biaya seleksi akademis dan biaya pemilihan ulang.

3. Melaksanakan kampanye

Kampanye merupakan sebuah tindakan dan usaha yang dilakukan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Usaha kampanye dapat dilakukan secara individual dan berkelompok. Kampanye biasanya dibarengi dengan slogan, gambar, suara ataupun dengan bentuk simbol.

Pelaksanaan kampanye dalam pemilihan kepala Desa Kuta Tinggi sama seperti kampanye pada umumnya. Biasanya calon kepala desa memilih simbol berupa gambar buah. Dalam gambar tersebut dicantumkan nama calon serta slogan. Disamping itu pelaksanaan kampanye juga dilakukan dengan berkeliling desa serta diiringi oleh para pendukungnya.

D. Tahapan Pencalonan Marga Bancin

1. Tahapan pada marga bancin

Sebelum diadakannya penentuan calon pada Marga Bancin, tahapan yang dibuat adalah:

a) Martahi Tataring (Perkumpulan Sekeluarga)

Martahi tataring adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh calon kepala desa dari marga Bancin. Dalam tahapan martahi tataring ini, orang-orang yang mengikuti perkumpulan ini adalah semua anggota keluarga dari keturunan oppu yang akan naik menjadi calon kepala desa. Seperti anggota keluarga calon kepala desa tahun 2022 yaitu keturunan dari Opu Ja Tua. Dalam pertemuan ini, anggota keluarga memilih siapa yang layak untuk dinaikkan sebagai calon kepala desa. Sehingga pada acara martahi tataring yang dilaksanakan oleh keturunan Opu Ja Tua menetapkan Pintoruli Bancin sebagai calon kepala desa.

b) Paboahon Tu Dongan Tubu (Memberi tahu kepala Saudara Semarga)

Setelah menetapkan calon kepala desa pada acara martahi tataring, tahapan selanjutnya yang dilaksanakan calon kepala desa dari marga Bancin adalah Paboahon tu dongan tubu. Pada tahap paboahon tu dongan tubu ini, kelompok keturunan marga yang mendapat giliran mencalonkan kepala desa memberitahukan kepala kerabat satu marganya yaitu kelompok keturunan marga Bancin yang ada di Desa Kuta Tinggi.

Maksud dari tahapan paboahon tu dongan tubu yang dibuat oleh kelompok keturunan yang akan naik menjadi calon kepala desa adalah supaya anggota marga Bancin yang berasal dari semua anggota kelompok marga Bancin yang ada di Desa Kuta Tinggi mengetahui siapa yang akan naik menjadi calon kepala desa dari pomparan dari oppo Ja Tua sekaligus ingin meminta dukungan kepada kerabat semarganya.

c) Paboahon Tu Dongan Sahuta (Memberi tahu kepada saudara sekampung)

Pada tahap ketiga yang dilakukan oleh calon kepala desa dari marga Bancin adalah paboahon tu dongan sahuta. Pada tahap ini marga Bancin memberi tahu kepada seluruh penduduk Kuta Tinggi bahwa siapa yang akan menjadi calon kepala desa dari marga Bancin. Cara memberi tahu yang dilakukan oleh marga Bancin yaitu dengan orasi keliling kampung Kuta Tinggi. Pada saat itu juga marga Bancin meminta dukungan kepada seluruh anggota masyarakat desa Kuta Tinggi untuk memilih calonnya.

E. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Kampanye yang Dilakukan Calon Kepala Desa

Kuta Tinggi

1. Kampanye dari rumah ke rumah

Teknik kampanye seperti ini banyak dijumpai diperkampungan yaitu dengan menjumpai keluarga ataupun kerabat dekat. Kampanye seperti ini terlihat jelas di Desa Kuta Tinggi, dimana tim sukses yang dipilih oleh calon kepala desa mendatangi keluarga ataupun kerabatnya langsung kerumahnya langsung. Seperti yang dilakukan oleh tim sukses dari calon marga Tambunan, mereka menjumpai kerabat marganya terlebih orang yang pendarang disana. Ada juga yang berani menjumpai marga Bancin di desa itu walaupun mereka jelas tahu bahwa kandidat kepala desa marga Bancin mencalonkan diri. Marga Bancin yang dijumpainya ini merupakan orang yang masih ada hubungan tali persaudaraan yang dekat karena hubungan perkawinan antara marga pendarang dengan marga lokal. Tidak hanya tim sukses dari marga Tambunan, tim sukses dari marga Bancin juga menjumpai seluruh masyarakat yang ada di Desa Kuta Tinggi terutama di dusun Rimbaru. Tim sukses dari calon marga Bancin menghimbau kepada marga pendarang untuk memilih calonnya dalam pemilihan kepala desa nanti karena tradisi dan juga amanah dari leluhur marga Bancin di desa itu bahwa

yang akan menjabat sebagai kepala desa di desa itu haruslah berasal dari marga lokal yaitu marga Bancin.

2. Kampanye di warung kopi

Kampanye yang dilakukan oleh tim sukses pemilihan kepala desa tidak hanya dari rumah ke rumah saja akan tetapi tim sukses juga berkampanye ditempat mereka istirahat atau menghabiskan waktu senggang mereka yaitu di warung kopi. Seperti yang kita ketahui bahwa warung kopi merupakan tempat orang-orang beradu politik. Karena berhubung di Desa Kuta Tinggi akan dilaksanakan pemilihan kepala desa, warung kopi merupakan salah satu tempat yang tepat bagi tim sukses. Tapi tidak semua warung kopi di desa itu dibuat jadi tempat untuk berkampanye terlebih kepada tim sukses dari marga Tambunan karena mereka merupakan orang pendatang ke desa itu.

Maka dalam hal seperti ini akan terlihat primordialisme marga, dimana bahwa tim sukses dari marga Tambunan tidak bebas untuk berkampanye diberbagai tempat, mereka hanya berkampanye secara diam-diam karena takut kepada tim sukses marga Bancin yang berstatus sebagai marga lokal.

BAB V

DAMPAK PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS MARGA BANCIN DALAM PILKADES DI DESA KUTA TINGGI TINDAKAN MANIPULASI DAN MOBILISASI

Gejala dan dampak dari politik identitas, di beberapa daerah bisa dijadikan suatu referensi bahwa selain menguatkan integritas dalam suatu kelompok pada waktu yang sama juga terjadinya suatu kondisi disintegrasi dalam masyarakat. Politisasi SARA seringkali menjadi pemicu hadirnya konflik dalam masyarakat. Berangkat dari suatu penggunaan politik identitas di desa Kuta Tinggi dalam kontestasi pilkades maka tentu memiliki dampak baik di dalam marga Bancin maupun antar marga Bancin. Berikut hasil pengamatan mengenai dampak politik identitas:

“Marga Bancin dengan penerapan strategi politik yang apik yaitu agenda pertemuan di dalam marga Bancin sangat intens dengan tujuan menyatukan komitmen bersama memenangkan kontestasi semakin menguatkan integritas kelompok” (Hasil pengamatan, 06 Juni 2023).

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, politik identitas memiliki pengaruh yang sangat besar terkhusus pada masyarakat yang multi marga Bancin seperti di desa Kuta Tinggi. Identitas sudah dimaknai sebagai instrument dalam agenda politik. Berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara refleksif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21). Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis.

Dalam pengamatan peneliti yang berkaitan dengan dampak dari penggunaan politik identitas tersebut satu bukti adalah dominasi posisi di dalam birokrasi pemerintahan desa.

“Jabatan ini dalam birokrasi pemerintahan desa Kuta Tinggi didominasi oleh marga Bancin Kenyataan ini tidak terlepas dari pengaruh identitas marga Bancin” (Hasil pengamatan, 06 Juni 2023).

Kenyataan diatas menunjukkan suatu paradoks dalam demokrasi. Praktek kebijakan seperti ini adalah cerminan dari otoriterianisme dalam pengambilan suatu keputusan. Jika melihat catatan sejarah, khususnya dalam pemerintahan pusat pada era kepemimpinan Soeharto memperoleh suatu referensi bahwa seperti apa bobroknnya suatu sistem sehingga hadir berbagai masalah seperti ketidakadilan, korupsi dan sebagainya.

Sementara itu, baik marga Bancin Marga berutu, Jombok dan Pa^{ang} kurang lebih keadaannya sama dengan marga Bancin terkait integritas dalam kelompok. Kolektivitas

yang terbangun merupakan suatu sikap komitmen dan tujuan yang sama sehingga menguatnya integritas. Akan tetapi jika bergeser pada dampak negatifnya adalah tumbuh perpecahan karena masing-masing marga Bancin menanamkan sikap ego atau etnosentrisme sehingga mengabaikan persatuan di tengah-tengah perbedaan yang disebabkan oleh konstruktifitas identitas politik etnik.

Mengutip Widayanti (2009: 18) secara filosofis identitas merupakan konsep yang mempunyai dua pengertian di dalamnya yaitu singleness over time dan sameness and difference. Berarti terdapat dua konsep mengenai identitas yaitu persamaan dan perbedaan. Hal inilah yang disebut konstruksi keakuan (selfness) dan yang lain (the other). Individu mengidentifikasi diri mereka dan orang lain. ketika individu membentuk siapa dirinya maka secara otomatis ia akan mencari negasinya atau the other. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Bapak ZF (29 Tahun):

“Di desa Kuta Tinggi pada waktu kampanye biasanya masing-masing marga Bancin melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan pikiran mendukung calon yang diusung dari marga Bancinnya. Sehingga solidaritas dan kekompakan dalam masing-masing marga Bancin memiliki pengaruh yang potensial dalam merebut kekuasaan” (Hasil wawancara, 06 Juni 2023).

Dari wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa sangat relevan dengan kutipan (Widayanti 2009: 18) bahwa dalam politik identitas terdapat proses yaitu individu mengidentifikasi diri mereka dan orang lain. ketika individu membentuk siapa dirinya maka secara otomatis ia akan mencari negasinya atau the other. Untuk mengetahui informasi mengenai dampak dari politik identitas tersebut, berikut kutipan wawancara dengan Bapak AA (72 Tahun):

“Dampak positifnya adalah ikatan kekeluargaan khususnya masing-masing marga Bancin sangat kuat dimana mereka memiliki satu kekompakan yang berorientasi kepentingan kelompok sedangkan dampak negatifnya terjadi suatu kondisi politik yang mana masyarakat di dalamnya saling mencibir dan mengunggulkan calon dari marga Bancin masing-masing. Adapun hal tersebut tidak sampai pada proses penyelesaian masalah di ranah hukum” (Hasil wawancara, 06 Juni 2023).

Berkaitan dengan dampak dari penggunaan politik identitas marga Bancin tersebut, berikut pernyataan dari ZF (29 Tahun):

“Dampak positifnya adalah memperkuat tali silaturahmi sedangkan dampak negatifnya bermula dari sikap ego yang berlebihan biasanya memunculkan suhu politik yang panas sehingga kata-kata kotor banyak keluar” (Hasil wawancara, 06 Juni 2023).

Berkaitan dengan tanggapan terkait penggunaan politik identitas marga Bancin di desa Kuta Tinggi, berikut ini adalah pernyataan JM (29 Tahun):

“Menurut saya adalah ini menjadi ajang silaturahmi, maka untuk itu harus dirawat terus. Nilai-nilai di dalamnya adalah salah satunya meningkatkan solidaritas” (Hasil wawancara, 07 juni 2023).

Melihat pernyataan informan di atas, masyarakat menanggapi hal tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja. Justru di dalam dinamika penerapan politik identitas membuka ruang komunikasi di dalam masing-masing marga Bancin sehingga memungkinkan tumbuhnya solidaritas kelompok. Meskipun pada sisi lain tidak bisa kita lihat bagaimana pembelahan terjadi yaitu antar marga Bancin memiliki egoism dan berimplikasi terjadinya konflik.

Politik identitas dalam kontestasi politik pilkades desa Kuta Tinggi menciptakan suatu kondisi masyarakat integritas dalam suatu kelompok di sisi lain terjadinya suatu disintegrasi atau perpecahan antar kelompok. Disintegrasi atau konstalasi dalam perpolitikan tersebut dinilai tidak terlalu mengancam kehidupan social masyarakat setempat sehingga tidak memerlukan suatu proses hukum dalam menangani persoalan tersebut. Satu hal yang menjadi pemicu utama konflik adalah kesadaran semua anggotanya terhadap suatu kelompok marga Bancin yang berlebihan atau sitilah etnosentrisme. Sikap seperti ini, mencerminkan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok marga Bancinnya yang dapat mengganggu kontak atau keguyuban antar etnik, bahkan dapat menimbulkan diskriminasi, buruksangka, kekerasan dan konflik antar marga Bancin (Darity, 2005). Mengutip wawancara dengan Bapak GM (60 Tahun) sebagai berikut:

“Politisasi marga Bancin ini berpengaruh nantinya dalam menentukan jabatan pada birokrasi berdasarkan kesamaan marga Bancin. Contohnya adalah jabatan sekretaris desa, kepala kaur dan lainnya. Hal ini sudah jadi rahasia umum dan tidak bisa ditolak karena logikanya marga Bancin manapun yang menduduki jabatan kepala desa pasti dalam menempatkan seseorang untuk jabatan tertentu dalam birokrasi di dominasi oleh orang-orang yang notabenenya memiliki kedekatan emosional atau garis keturunan” (Hasil wawancara, 06 Juni 2023).

Dari wawancara tersebut, semakin jelas bahwa politik identitas memang tidak hanya bertujuan untuk memenangkan kontestasi melainkan adalah ada halhal lain yang ingin dicapai yaitu melakukan dominasi kekuasaan ketika menjabat sebagai kepala desa Sehingga asumsi-asumsi terkait politisasi identitas marga Bancin terbukti merupakan suatu strategi untuk tujuan politis yang dibangun dan terorganisir.

Dampaknya adalah baik disadari atau tidak disadari memiliki implikasi baik dalam intra marga Bancin maupun antar marga Bancin. Dari informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penggunaan politik identitas marga Bancin khususnya dalam masing-masing intra marga Bancin memiliki dampak positif dan negatif.

A. Dampak Positif

Geliat politik local di desa Kuta Tinggi menjurus ke arah dinamis. Semua kontestan disibukkan dengan bagaimana menerapkan cara-cara dalam mempengaruhi konstituen atau masyarakat pemilih. Menyoroti pendekatan yang dilakukan oleh elit-elit politik yaitu kontestan dalam penyelenggaraan pilkades tersebut, menunjukkan suatu pendekatan yang terstruktur. Melihat masyarakat yang cenderung berada dalam suatu sistem primordialis atau suatu ikatan kekeluargaan yang kuat maka kemudian masuk politik identitas sehingga tercipta suatu ruang integrasi dalam masing-masing marga Bancin.

Dampak positif dari penggunaan politik identitas marga Bancin ini yaitu semakin menguatnya persatuan atau integritas masing-masing marga Bancin karena kesadaran kolektif kelompok. Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa kolektivitas kelompok ini terbangun oleh konstruksi elit-elit politik yang sistemik dan terorganisir. Individu-individu diakomodir ke dalam ruang politik yang semu dimana situasi demokrasi yang paradoks terpampang nyata. Dalam situasi sosialisasi semu yang diungkapkan oleh Ost, menumbuhkan suatu solidaritas politik dengan berdiri di atas kepentingan kelompok.

Dari aspek marga Bancin, Marga Bancin, Jombok dan Pa'ang khususnya pada tahun politik terciptanya suatu kondisi kerekatan pada masing-masing marga Bancin. Politik identitas tersebut semakin memperjelas identitas individu-individu di dalam masyarakat, melalui konstruktivisme oleh elit-elit politik sebagai alat dan tujuan politik. Solidaritas politik yang dibangun tersebut adalah mobilisasi massa dengan menjanjikan kesejahteraan kelompok sehingga kekuatan persaudaraan dalam marga Bancin terakomodir dengan baik.

B. Dampak Negatif

Politik identitas yang turut serta dalam tahun pemilu pilkades di desa Kuta Tinggi adalah realitas yang sudah terbangun lama. Implikasinya adalah menciptakan suatu realitas sosial yang membelah dan membagi masyarakat berdasarkan marga Bancin. Hal tersebut sangat fragmentatif karena dinamika politik bergerak ke zona keterpecahan sosial, sungguh sebuah kenaiifan politik atau faktualitas politik. Solidaritas politik bersifat politis karena kepentingan kekuasaan.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis

kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan; 2010: 1-2).

Konflik yang terjadi selama penyelenggaraan pilkades di desa Kuta Tinggi adalah konflik yang bersifat struktural. Dalam masyarakat yang pluralis yakni keberadaan empat marga Bancein adalah menunjukkan konstalasi politik yang bersuhu panas. Komunikasi memiliki penggunaan penting dalam konstruksi marga Bancein oleh elit-elit politik. Narasi sempit dengan memperjuangkan kesejahteraan kelompok membuat peta konflik semakin nampak di permukaan. Ruang sosialisme masyarakat menjurus ke arah perpecahan karena langgengnya sekte-sekte.

Kesadaran persamaan dan perbedaan dalam masyarakat yang mana berawal dari faktor politis mewujudkan sikap etnosentrisme pada masing-masing marga Bancein. Khususnya dalam tahun politik tersebut masing-masing kelompok marga Bancein berdiri atas kepentingan kelompok. Hal tersebut kemudian memicu konflik karena sikap etnosentrisme yang ditunjukkan dengan merendahkan satu sama lain. Konflik yang terjadi tergolong konflik yang kecil dan tidak menimbulkan korban jiwa, maka dalam penyelesaian konflik tersebut adalah tergantung pada kesadaran antar marga Bancein yang berkonflik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, Pertama; bahwa dalam penggunaan politik identitas marga Bancin dalam pemilihan kepala Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022. Fenomena politik identitas yang terjadi di desa Kuta Tinggi, marga Bancin memiliki kekuasaan dan posisi tertinggi serta memiliki penggunaan besar dalam berdirinya daerah tersebut. Proses pemilihan kepala desa kuta Tinggi, faktor kesukuan dan marga merupakan suatu yang dominan ketimbang kapasitas dari sang kandidat. Dilihat dari permasalahan yang terjadi di desa Kuta Tinggi, jika salah satu calon kandidat kepala desa marga Bancin, Maka hal itu akan menjadi penguat untuk menjadi pemimpin di desa tersebut.

Kedua; bahwa politik identitas marga Bancin dalam memanipulasi dan memobilisasi pemilihan kepala desa kuta Tinggi penggunaan politik identitas marga bancin selalu di digunakan para calon kepala desa untuk manipulasi dan mobilisasi masyarakat desa kuta tinggi, berdasarkan penelitian yang di lakukan di lapangan masyarakat desa kuta Tinggi cenderung memilih calon kepala desa berdasarkan marga yang sama yaitu marga bancin.

B. Saran

Politik identitas berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat baik yang disebabkan oleh ego etnosentrisme, manipulasi dan ketidakadilan. Motif utama atau pemicu politisasi marga Bancin adalah kepentingan politik yang menurut Undang-Undang langkah tersebut tidak demokratis. Maka dari itu, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Di dalam masyarakat sudah terdapat dampak negatif apalagi pada masyarakat majemuk seperti di desa Kuta Tinggi, maka jangan kemudian orang-orang berkepentingnya mempolitisasi marga Bancin karena nafsu kekuasaan yang sesat. Jika hal tersebut terjadi akan hadir sebuah konflik yang bereskalasi terus menerus.
2. Kepada pihak masyarakat jangan menerima politik yang tidak mendidik, gunakan rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan pada calon kepala desa. Pahami visi misi dan programnya bukan membiarkan apalagi memilih dengan mengedepankan kesamaan ideologis atau marga Bancin.

3. Kepada panitia pengawas pemilu harus pro aktif terhadap politisasi marga Bancin dalam materi kampanye masing-masing calon. Berikan aturan dan sanksi tegas terhadap calon-calon yang melanggar aturan dalam berkampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ubed, 2002. *Politik Identitas Etnis; Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Indonesiatara.
- Afif. 2012:18. *Pola Interaksi Individu dalam Kelompok Sosial*. Unpad: Komunikasi Politik.
- Ainur, F. (2020). Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019 : Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 83–100. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8499>
- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), 113–114. <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5451/2120>
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019 : Perspektif Populisme The Impact of Identity Politics On President Election 2019 : Populism Perspective. *Politica*, 11(1), 43–63. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Asmore, Richard, D.; Jussim, L. Dan Wilder, David. (Eds.). 2001. *Socail Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*. Oxford: Oxford University Press. Banks. 2005. *Ethnicity: Anthropological Constructions*. London: Routledge.
- Barker.2004: 416.*Ethnicity and Nationalism (anthropological perspec-tive)*. London:Pluto Press.
- Bisuk Siahaan, *Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. (Jakarta: Kempala Foundation, 2005)
- Christ, Darmait Mac Giolla. 2003. *Language, Identity and Conflict: A Comparative studyof language in ethnic conflict in Europe and Eurasia*. New York: Routledge.
- Dada Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Sumatera*. (Medan: Firma Hasma, 1974)
- Firmansyah, Dedi. “Peran Politik Etnis dalam Pilkada ; Studi Atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2009.” Skripsi Fakultas Syari“ah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2009).
- H. Gayatri, Irene. *Makalah Demokrasi Lokal (di Desa)*, Bandung, 16 April 2007
- Harison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media. Irianti. 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003)
- Kemala.1989. *Atribut Identitas dalam Kajian Semiotik Bahasa*.Jakarta : Bina Aksara.
- Khairuddin.2009. “Politik Etnis dalam Perebutan Kekuasaan Mmenjelang Pemilu 2009; Studi Atas Partai Politik Islam di Kota Pontianak.” Skripsi Fakultas Syari“ah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Kinasih. 2005:17. *Pembentukan Identitas dalam Perspektif Konstruktivisme*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lister Berutu, dan Nurbani Padang (ed.) *Tradisi dan Perubahan*. (Medan: Grasindo Monoratama,2007)
- M. Nawawi, Dkk.2010. “Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada”: Studi kasus pilkada di kabupaten Poso. Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mariana, Dede. 2008. *Mekanisme Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mariana, Dede. 2008. *Mekanisme Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Firmansyah, Dedi. “Peran Politik Etnis dalam Pilkada ; Studi Atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2009.” Skripsi Fakultas Syari“ah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2009).
- P.H. Collin. 2004:.. *PoliticalTheory –Hand Book of Political Science* (Addision– Wesley Publishing Company).
- Prihartanti, Nanik dkk, *Jurnal Penelitian Humaniora, Mengurai Akar Kekerasan Etnis Pada Masyarakat Pluralitas*, Vol.10.No.2 Agustus 2009, 108.

- Siahaan, E. K., dkk., *Survei Monografi Kebudayaan Pakpak Dairi di Kabupaten Dairi*. Medan: (Medan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Sumatera Utara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1977/1978)
- Sinuhaji, Tolen dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*. (Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. 1999/2000)
- Sumaryanto. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito.
- Surbakti, Ramlan. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Tirtosudarmo. 2007. *Konstruktivisme Identitas Politik*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Tolen Sinuhaji, dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*. Medan: (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. 1999/2000)
- Umar.2003. Pengertian Data Primer. Wikipedia.
- Widayanti. 2009. Konsep Mengenai Identitas. Yogyakarta:Mata Bangsa.
- Wijaya, H.A.M. 2008. Otonomi Desa.Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Wirawan. 2010:1-2. Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial. Yogyakarta: Kanisius.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut ini adalah pedoman wawancara dalam penelitian :

1. Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Kuta Tinggi?
2. Bagaimana penggunaan politik identitas di desa Kuta Tinggi dalam memenangkan kontestasi pilkades?
3. Dari empat marga di desa Kuta Tinggi, apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?
4. Secara kuantitas, Marga apa yang memiliki jumlah penduduk dominan didesa Kuta Tinggi?
5. Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas marga didesa Kuta Tinggi?
7. Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?
8. Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?
9. Bagaimana penyelesaian konflik di desa Kuta Tinggi pada saat pilkades?

DATA INFORMAN DALAM WAWANCARA

1. Nama : Sudung Bancin
Umur : 58 Thn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Kuta Tinggi
2. Nama : Saritua Monang Bancin
Umur : 72 Thn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Adat
Alamat : Kuta Tinggi
3. Nama : Rustam Manik (RT)
Umur : 25 Thn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Pemuda
Alamat : Kuta Tinggi
4. Nama : Jumaidin Bancin
Umur : 29 Thn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Pemuda
Alamat : Kuta Tinggi
5. Nama : Siti Samsia Tumangger
Umur : 55 Thn
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kuta Tinggi

6. Nama : Gabi Mustafa Banurea
Umur : 60 Thn
JenisKelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kuta Tinggi
7. Nama : Ahmad Esa Berutu
Umur : 50 Thn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kuta Tinggi
8. Nama : Ahmad Salim Bancin
Umur : 22 Thn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kuta Tinggi
9. Nama : Zulfahmi Bancin
Umur : 29 Thn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Kuta Tinggi

DATA HASIL WAWANCARA

Nama : Benar Bancin
 Jabatan : Tokoh Adat
 Hari/tgl wawancara : selasa, 06 Juni 2023
 Tempat : Desa Kuta Tinggi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Kuta Tinggi?	<i>"Peran marga bisa dikatakan berpengaruh dalam pilkades di desa Kuta Tinggi, apalagi pada masyarakat pedesaan ikatan primordialnya sangat tinggi".</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Kuta Tinggi dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Seperti biasanya kontestan dalam pilkades melakukan pendekatan dengan sesama marganya. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan. Dalam pertemuan tersebut sangat kuat nilai budaya di dalamnya yakni dengan dirangkaikan do'a".</i>
3.	Dari empat marga di desa Kuta Tinggi, marga apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Yang mendominasi sampai pada periode ini adalah Marga Bancin".</i>
4.	Secara kuantitas, marga apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Kuta Tinggi?	<i>"Marga Bancin memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan ketiga marga lainnya".</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi Anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>"Menurut saya tidak menjadi masalah apalagi ini memudahkan kontestan yang didukung bisa menang".</i>
6.	Bagaimana tanggapan Anda terhadap eksistensi politik identitas marga di desa Kuta Tinggi?	<i>"Menurut saya adalah ini menjadi ajang silaturahmi, maka untuk itu harus dirawat terus. Nilai-nilai di dalamnya adalah salah satunya meningkatkan solidaritas.</i>
7.	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Dampak positifnya adalah ikatan kekeluargaan khususnya masing-masing marga sangat kuat dimana mereka memiliki satu kekompakan yang berorientasi ke penting kelompok".</i>
8.	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"dampak negatifnya terjadi suatu kondisi politik yang mana masyarakat di dalamnya saling mencibir dan mengunggulkan calon dari marga masing-masing.".</i>
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Kuta Tinggi pada saat Pilkada?	<i>"Adapun hal tersebut tidak sampai pada proses penyelesaian masalah di ranah hukum dimana pihak yang berkonflik akan diurus oleh tokoh adat tergantung pada tingkatan konflik".</i>

Nama : Zulfahmi
 Jabatan : Tokoh Masyarakat
 Hari/tgl wawancara : Selasa, 06 Juni 2023
 Tempat : Desa Kuta Tinggi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Kuta Tinggi	<i>"sangat berpengaruh tentunya dalam tahun politik pilkades didesa Kuta Tinggi".</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas kontestasi pilkades?	<i>"Politik identitas sangat jelas memiliki peranan penting dalam strategi memenangkan calon. Di desa Kuta Tinggi khususnya, masing-masing calon melakukan pendekatan dengan kelompok etnisnya Tujuannya adalah mengumpulkan kekuatan atau menguatkan basis dalam memenangkan pilkades".</i>
3.	Dari marga yang ada marga di desa Kuta Tinggi, Marga apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>Marga Bancin</i>
4.	Secara kuantitas, marga apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Kuta Tinggi?	<i>"Marga Bancin lebih mendominasi".</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>"preferensi dalam memilih tentunya adalah berdasarkan margaitas, ini menyangkut nama baik marga".</i>
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas marga di desa Kuta Tinggi?	<i>"Sudah menjadi hal biasa".</i>
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Dampak positifnya adalah memperkuat tali silaturahmi".</i>
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Bermula dari sikap ego yang berlebihan biasanya memunculkan suhu politik yang panas sehingga kata-kata kotor banyak keluar".</i>
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Kuta Tinggi pada saat pilkades?	<i>"konflik biasanya diselesaikan secara adat artinya tidak ada keterlibatan pihak kepolisian".</i>

Nama : Siti Samsia
 Jabatan : Masyarakat biasa
 Hari/tgl wawancara : Selasa 06 juni 2023
 Tempat : Desa Kuta Tinggi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Kuta Tinggi	<i>"Ia, memiliki pengaruh".</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Kuta Tinggi dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Kami biasanya berkumpul di dalam masing-masing marga membicarakan terkait kontestasi tersebut. Disitu kemudian menyatukan komitmen untuk mendukung kontestan yang diusung dari marga kami.</i>
3.	Dari empat marga di desa Kuta Tinggi, marga apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>Marga Bancin</i>
4.	Secara kuantitas, marga apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Kuta Tinggi?	<i>Marga Bancin</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>"sayakalauditanyapilihsiapasaatpilkades, sayajawabpastisayaakanmemilih orang terdekatsecaramarga".</i>
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas marga di desa Kuta Tinggi?	<i>"sudah hal biasa".</i>
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Merekatkan tali kekeluargaan".</i>
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Kadang-kadang ada konflik karena saling mengunggulkan kontestan dari marga masing-masing".</i>
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Kuta Tinggi pada saat pilkades?	<i>"Tokoh adat punya kewenangan dalam menangani hal tersebut".</i>

Nama : Ali Mustaram
 Jabatan : Mantan Kepala Desa Kuta Tinggi
 Hari/tgl wawancara : Selasa 06 juni 2023
 Tempat : Desa Kuta Tinggi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Kuta Tinggi	<i>“Sangat berpengaruh”.</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Kuta Tinggi dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>“Politik identitas tidak bisa dihindari dalam masyarakat khususnya di desa Kuta Tinggi, karena ini sudah menjadi hal yang turun temurun. Masyarakat tidak heran dalam memilih pemimpin apa kali didasarkan pada identitas”.</i>
3.	Dari empat marga di desa Kuta Tinggi, marga apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>Marga Bancin</i>
4.	Secara kuantitas, marga apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Kuta Tinggi?	<i>Marga Bancin</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>“Secara pribadi saya akan memilih sesuai dengan marga saya. Komitmen yang sudah dibentuk dalam pertemuan tersebut adalah menjadi landasan kuat siapa yang saya dan kami pada umumnya dalam pemilihan”.</i>
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas marga di desa Kuta Tinggi?	<i>“Karena ini sudah menjadi kebiasaan disini tentu sebagai strategi politik maka biarkan saja terus eksis, pun tidak ada sampai saat ini teguran dari pihak berwajib”.</i>
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>:menguatkan ikatan silaturahmi”.</i>
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>“biasanya konflik terjadi pada saat-saat penyelenggaraan pilkades”.</i>
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Kuta Tinggi pada saat pilkades?	<i>“Ini wewenang tokoh adat disini”.</i>

Nama : Ahmad Esa
 Jabatan : Masyarakat
 Hari/tgl wawancara : Selasa, 06 Juni 2023
 Tempat : Desa Kuta Tinggi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Kuta Tinggi	<i>"Memiliki pengaruh".</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Kuta Tinggi dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Melalui politik identitas, bisa memuluskan tujuan politik masing-masing marga".</i>
3.	Dari empat marga di desa Kuta Tinggi, marga apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Untuk jabatan kepala desa Kuta Tinggi, perwakilan marga Ndaheseingkalimemenangkan pilkades".</i>
4.	Secara kuantitas, marga apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Kuta Tinggi?	<i>"Marga Ndahememang merupakan marga terbesar di desa Kuta Tinggi, ia mendominasi marga lainnya.".</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>"Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap individu lebih banyak yang memilih berdasarkan marga termasuk saya".</i>
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas marga di desa Kuta Tinggi?	<i>"Sudah turun temurun dan saya kira masyarakat bisa menerima itu".</i>
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Bisa menjadi ruang sosialisasi sekaligus momen silaturahmi".</i>
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Menimbulkan konflik, baik dipicu oleh sikap etnosentrime maupun hal lainnya".</i>
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Kuta Tinggi pada saat pilkades?	<i>"Tokoh adat memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik di desa ini".</i>

Nama : Jumaidin
 Jabatan : Masyarakat
 Hari/tgl wawancara : Selasa, 06 Juni 2023
 Tempat : Kuta Tinggi, desa Kuta Tinggi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkadesdi desa Kuta Tinggi	<i>"Menurut saya berpengaruh, dengan melihat realitasnya bahwa masyarakat diklasifikasikan berdasarkan margaitas"</i> .
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Kuta Tinggi dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Hal ini memang tidak bisa dinafikan lagi, momentum pilkades biasanya mengikutsertakan politisasi marga oleh marga untuk menjaring massa"</i> .
3.	Dari empat marga di desaKuta Tinggi, marga apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>Marga Bancin</i>
4.	Secara kuantitas, Marga apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Kuta Tinggi?	<i>Marga Bancin</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>"Memilih itu adalah hak bagi masing- masing konstituen, kecenderungan saya dalam memilih adalah melihat marga. Ini memang relatif"</i> .
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas marga Bancin di desa Kuta Tinggi?	<i>"Tanggapan saya sebagai tokoh masyarakat bahwa ini memang merupakan suatu tindakan politis yang mencederai demokrasi, akan tetapi kita tidak bisa melawan paham masyarakat disini yang mana identitas menurutnya adalah sesuatu yang diagungkan. Jadi, susah untuk dibendung dan pada akhirnya ini menjadi suatu pola yang berlangsung terus menerus"</i> .
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Dalam situasi politik yang dinamis tersebut menciptakan suatu situasi solidaritas di dalam marga, ia kemudian menjadi ruang sosialisasi dan penyatuan atau integrasi"</i> .

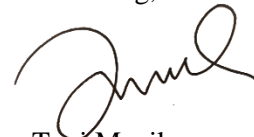
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>“Secara konkrit bahwa memang politik identitas tersebut memunculkan egoisme, suatu sikap yang mana antar marga berbenturan”.</i>
9.	Bagaimanapenyelasiaan konflik di desa Kuta Tinggi pada saat pilkades?	<i>“Pertimbangannya adalah bahwa di desa Kuta Tinggi yang menguat sistem budaya maka dalam pemrosesan masalah biasanya diselesaikan oleh Tokoh adat”.</i>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Toni Manik
NIM : 1606016008
Tempat, Tanggal Lahir : Napatumbuk, 24 Januari 1997
Agama : Islam
Alamat : Kuta Rimbaru, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik
No Hp : 081226357003
Pendidikan :
a) SD : SDN Kuta Tinggi
b) SMP : SMP Negeri Kuta Tinggi
c) SMA : SMK PGGS
Emial : tonymanik97@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2023



Toni Manik
1606016008

1. Foto bersama salah satu pemuda Kuta Tinggi



2. Foto bersama warga Kuta Tinggi



3. Ibu Siti Samsia Tumangger

